KONSTRUKSI PEMBERITAAN DI HARIAN KEDAULATAN RAKYAT

(Analisis Wacana Kritis Berita Proses Hukum Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswi Universitas Gajah Mada)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial Dan Humaniora

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh

Gelar Sarjana Strata Komunikasi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Disusun Oleh:

Syakirun Ni'am

15730132

Pembimbing:

Fatma Dian Pratiwi, S.Sos., M.Si.

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

2020

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Syakirun Ni'am

NIM : 15730132

Tempat Tanggal Lahir: Cilacap, 30 Maret 1996

Jurusan : Ilmu Komunikasi

Fakultas : Ilmu Sosial dan Humaniora

Menyatakan dengan sungguhnya, bahwa skripsi saya yang berjudul: KONSTRUKSI PEMBERITAAN DI HARIAN KEDAULATAN RAKYAT (Analisis Wacana Kritis Berita Proses Hukum Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswi Universitas Gajah Mada) merupakan karya pribadi yang tidak mengandung plagiarisme dan materi yang telah dipublikasikan orang lain. Beberapa sumber yang penulis rujuk dan menjadi bagian penting dalam karya penelitian ini ditulis sesuai dengan kaidah yang telah ditetapkan.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya agar dapat diketahui oleh dewan penguji.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 12 November 2020

Yang membuat pernyataan,

METERAI TEMPEL
257C1AFF688124731
6000
ENAM RIBU RUPIAH

Syakirun Ni'am

NIM: 15730132

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 0812272Fax. 519571 YOGYAKARTA 55281

NOTA DINAS PEMBIMBING
FM-UINSK-PBM-05-02/RO

Hal : Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta

Assalamu'alaikumWr. Wb

Setelah memberikan, mengarahkan dan mengadakan perbaikan seperlunya maka selaku pembimbing saya menyatakan bahwa skripsi saudara:

Nama : Syakirun Ni'am
NIM : 15730132
Prodi : Ilmu Komunikasi
Judul :

KONSTRUKSI PEMBERITAAN DI HARIAN KEDAULATAN RAKYAT
(Analisis Wacana Kritis Berita Proses Hukum Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswi Universitas Gajah Mada)

Telah dapat diajukan kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Komunikasi.

Harapan saya semoga saudara segera dipanggil untuk mempertanggung-jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian atas perhatian Bapak, saya sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikumWr. Wb

Yogyakarta, 13 November 2020
Pembimbing

Fatma Dian Pratiwi M. Si
NIP. 19750307 200604 2 001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA
Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 585300 Fax. (0274) 519571 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-03/Un.02/DSH/PP.00.9/01/2021

Tugas Akhir dengan judul : Konstruksi Pemberitaan di Harian Kedaulatan Rakyat (Analisis Wacana Kritis Berita Proses Hukum Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswi Unibersitas Gajah Mada)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : SYAKIRUN NI'AM
Nomor Induk Mahasiswa : 15730132
Telah diujikan pada : Kamis, 26 November 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A/B

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Fatma Dian Pratiwi, S.Sos M. Si.
SIGNED

Valid ID: 5feab063a5bf7

Penguji I

Drs. Bono Setyo, M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5fc704469fee3

Penguji II

Drs. Siantari Rihartono, M.Si
SIGNED

Valid ID: 5fd6e1f4640a0

Yogyakarta, 26 November 2020
UIN Sunan Kalijaga
Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora

Dr. Mochamad Sodik, S.Sos., M.Si.
SIGNED

Valid ID: 5ff18d04d2a6e

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

MOTTO

Jangan dibunuh, sekalipun orang itu jahat. Jangan diperkosa, sekalipun itu kuda

(Pesan Am Siki kepada anaknya, Siprianus Portakes Oetimu, dalam novel Orang-Orang Oetimu karya Felix K. Nesi)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini untuk:

ALMAMATER

PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI

FAKLULTAS ILMU SOSIAL DAN HUMANIORA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

Puji Syukur Alhamdulillah, terimakasih tiada berakhir kepaa Alloh SWT., yang telah memberikan kesempatan dan rahmat kepada penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda agung Nabi Muhammad SAW., yang mengajarkan pada kita bagaimana menghargai manusia.

Penulis berharap penelitian ini bisa menjadi sumbangsih untuk masyarakat berkaitan dengan literasi media, utamanya dalam bagaimana media massa membangun konstruksi wacana tentang perempuan—kaum ibu kita semua. Media massa merupakan saluran yang tidak netral dan syarat akan kepentingan golongan. Saluran ini mereproduksi wacana dan ideologi kaum dominan.

Penulis berterimakasih kepada semua pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Penulis tidak bisa sejauh ini tanpa sumbangsih mereka semua. Semoga Alloh senantiasa memberikan pertolongan kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora Dr. Mochamad Sodik, M.Si
2. Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora, Universitas Islam Sunan Kalijaga, Yogyakarta Rama Kertamukti, M.Sn
3. Dosen Penasehat Akademik, Prof. Dr. Iswandi Syahputra, S.Ag., M.Si., yang telah membimbing penulis selama menjadi manempuh masa studi.
4. Dosen Pembimbing Skripsi Fatma Dian Pratiwi, S.Sos., M.Si., yang telah menuntun penulis selama mengerjakan penelitian ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

5. Penguji I Drs. Bono Setyo, M.Si. dan penguji II Drs. Siantari Rihartono, M.Si., terimakasih atas semua koreksi terhadap penelitian ini.
6. Dosen, Karyawan, dan Staf Tata Usaha Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang telah membangun ruang dan budaya akademik yang baik. Semoga hari-harimu selalu dalam kebaikan.
7. Ibunda kami, Sulkhaniyah, yang telah membesarkan anak-anaknya seorang diri. Maafkan kami yang selalu merepotkan.
8. emoga hari-harimu selalu dalam kebaikan. Semoga hari-harimu selalu dalam kebaikan. Semoga hari-harimu selalu dalam kebaikan. Semoga hari-harimu selalu dalam kebaikan. Kakak saya, Rofiqoh Ahsanti dan suaminya Joko Agus Yasin, serta ksatria kecilnya, Rifdi Misas Chausam. Terimakasih atas segala dukungannya.
9. Teman-teman Ilmu Komunikasi angkatan 2015 yang banyak membantu saya.
10. Teman dekat Anisa Dewi Anggriaeni yang telah membantu menyediakan buku tentang gender dan memberikan perhatiannya kepada penulis.
11. Keluarga besar LPM Arena yang telah memberi ruang kepada penulis mempelajari banyak hal dan memberikan tawaran pandangan hidup. Terimakasih, terimaksih yang tidak terhingga.
12. Pengurus LPM Arena periode 2018 – 2019 yang telah penulis repotkan dan senantiasa menopang penulis selama menjalani masa kepengurusan yang tidak mudah: Ilham Rusydi yang senantiasa mem*back up* penulis,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ajid Fuad Muzaki, Rudianto, Afin Fariha, teman-teman divisi dan anggota yang sangat membantu: Bagus N.A., Zaim Yunus, Sidratul Muntaha, Fikriyatul Islami M., Hedi, Muawan, Akmaludin, Firdan, dan lainnya. Tentu saja orang-orang tua yang menjadi teman belajar dan sangat berjasa bagi penulis: Ahmad, Taufiq, Robi Kurniawan, Ahmad Jamaludin, Sabiq G.H., Rifai Asyhari, Lugas Subarkah, Faksi Fahlevi, Robandi, Isma Swastiningrum, Abdul Rohim, M. Rouf, dan lainnya. Terimakasih, terimakasih tidak terhingga.

13. Teman-teman Sedulur Ya BAKII Yogyakarta: Yahya Asmu'i, Sidik Nur Thoha, Faiz Rafi, Salman Hudi, dan lainnya. Terimakasih selalu menjadi teman-teman yang menerima penulis kembali.
14. Semua pihak yang telah memberikan bantuan, doa, dan harapan baik kepada penulis.

Penulis sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu proses penelitian ini. Penulis sadar dalam penelitian ini masih terdapat banyak kekurangan. Karenanya, penulis merasa perlu meminta maaf kepada nama-nama di atas dan juga generasi selanjutnya yang membaca penlitian ini. Akhirnya, penulis berdoa semoga karya ini bermanfaat dan kita diberi kesadaran dan kesmpatan untuk belajar.

Amin ya robbal'alamin.

Yogyakarta, 4 November 2020

Penulis

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
SURAT PERNYATAAN ii
NOTA DINAS iii
MOTTO v
HALAMAN PERSEMBAHAN vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI x
DAFTAR GAMBAR xii
DAFTAR BAGAN xiii
DAFTAR TABEL xiv
ABSTRACT xv
BAB I 1
PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 7
C. Tujuan Penelitian 7
D. Kegunaan Penelitian 7
E. Telaah Pustaka 8
F. Landasan Teori 12
G. Kerangka Berfikir 52
H. Metodologi Penelitian 53
BAB II 66
A. Sejarah Surat Kabar Harian Kedaulatan Rakyat 66
B. Data Media Kedaulatan Rakyat 69
C. Logo Kedaulatan Rakyat 70
D. Struktur Organisasi Kedaulatan Rakyat 70

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Sirkulasi Kedaulatan Rakyat 72
F. Jumlah Pembaca Kedaulatan Rakyat 73
G. Rubrikasi Kedaulatan Rakyat 74
H. Alamat 76
BAB III 79
A. Analisis Teks Pemberitaan Proses Hukum Kasus Agni 79
BAB IV 141
A. Kesimpulan 141
B. Saran 142
Daftar Pustaka 145
LAMPIRAN 148

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Kedaulatan Rakyat 70

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR BAGAN

Bagan 1 Proses Konstruksi Sosial Media Massa 16
Bagan 2 Kerangka Berfikir 52

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Matrix Tinjauan Pustaka 11
Tabel 2 Daftar Berita Tentang Proses Hukum Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswa UGM 54
Tabel 3 Kerangka Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills 65
Tabel 4 Data Media Kedaulatan Rakyat 69
Tabel 5 Struktur Organisasi Kedaulatan Rakyat 70
Tabel 6 Sirkulasi Koran Kedaulatan Rakyat 72
Tabel 7 Jumlah Pembaca Kedaulatan Rakyat 73
Tabel 8 Daftar Rubrik Kedaulatan Rakyat Edisi Senin - Sabtu 74
Tabel 9 Kesimpulan Analisis Berita Pertama 88
Tabel 10 Kesimpulan Analisis Berita Kedua 95
Tabel 11 Kesimpunlan Analisis Berita Ketiga 104
Tabel 12 Kesimpulan Anlisis Berita Keempat 112
Tabel 13 Kesimpulan Analisis Berita Kelima 120
Tabel 14 Kesimpulan Analisis Berita Keenam 130
Tabel 15 Kesimpulan Analisis Berita Ketujuh 139

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ABSTRACT

Kedaulatan Rakyat daily news is one of the mass media which massively reported the case of Agni's rape, student at Gajah Mada University. This case up to the public debate after BPPBM Balairung released investigative news about her when she did a community development program (CDP) in Pulau Seram, Maluku, 2017. This media continuously kept up the case, importantly when the law process was going on.

The approach of this research using the descriptive-qualitative method and for analysis using critical discourse analyses (CDA) by Sara Mills. The object of research is the social construction about news of law process to Agni's rape. While, the subject is seven news by Kedaulatan Rakyat newspaper about the process of law from this case from November 2018 until February 2019.

The conclusion of this research, Kedaulatan Rakyat's daily news reported Agni's rape from the construction of patriarchy ideology. This media continuously builds a narrative of distrust towards Agni and denying of her confessions. Agni as the victims is constructed as a liar.

Keywords: *The social construction of mass media, Rape, Agni*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Media massa kerap mengkonstruksi kasus perkosaan terhadap perempuan dalam skema ideologi patriarki. Mereka dilekati stereotip yang merugikan dan menjadi bagian subordinat dari kaum laki-laki. Korban kerapkali disudutkan, seperti bahwa kejadian itu merupakan kesalahannya sendiri. Sehingga, tindakan seksualitas kaum laki-laki terhadap perempuan yang dilakukan secara paksa itu dianggap wajar.

Kasus perkosaan terhadap perempuan merupakan masalah rumit. Dalam masyarakat yang patriarkis, di mana ideologi patriarki telah meresap ke dalam segenap organisasi masyarakat, perempuan korban perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya kerap tidak mendapatkan keadilan, bahkan ketika menempuh proses hukum. Hal ini dikarenakan unsur-unsur dalam hukum itu sendiri dipengaruhi ideologi patriarki. (dalam Dzuhayatin, Pitaloka, dan Abdullah, *Populasi*, 12, 2001: 48)

Sebagaimana pemberitaan perkosaan dan bentuk kekerasan seksual lainnya terhadap perempuan, pemberitaan proses hukum kasus kekerasan terhadap perempuan sangat rentan bias gender. Penelitian yang dilakukan Komnas Perempuan pada 2015 terhadap 9 media massa nasional mengungkapkan, pemberitaan kasus kekerasan seksual terhadap perempuan kerap melanggar kode etik jurnalistik, tidak mengedepankan hak korban, dan menghakimi korban. Media kerap mengkonstruksi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perempuan korban kekerasan seksual sebagai penyebab kejadian berikut stereotip yang bias gender.

Berkaitan dengan permasalahan di atas, peneliti bermaksud membedah konstruksi pemberitaan proses hukum dugaan kasus perkosaan terhadap Agni di Harian Kedaulatan Rakyat. Agni merupakan mahasiswi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (Fisipol) Universitas Gajah Mada (UGM) angkatan 2014. Ia diduga menjadi korban tindak perkosaan ketika menjalani kuliah kerja nyata (KKN) di Pulau Seram, Maluku pada Juni – Agustus 2017 silam.

Pada Jum'at 30 Juni 2017, Agni bermaksud pergi ke pondokan perempuan temannya untuk membicarakan program. Jarak pondokan Agni dengan teman perempuannya yang jauh, banyaknya binatang liar, serta hari yang sudah gelap—sementar listrik mati—mendorong Agni untuk mampir di pondokan laki-laki yang berada di tengah pondokannya dan temannya. Ia bermaksud mengajak teman KKN nya yang laki-laki untuk menemaninya. Namun, sekitar pukul tujuh malam hujan turun. Agni urung pergi ke pondokan perempuan dan berbincang dengan warga pemilik pondokan laki-laki dengan HS, si pelaku. Karena perbincangan itu berlangsung hingga larut, sementara ia tidak enak jika harus mengetuk pintu rumah pondokannya sendiri, ia menginap di pondokan laki-laki. Di tempat itu hanya ada HS. Tengah malam, ketika Agni tertidur, HS melakukan pemaksaan hubungan seksual. Agni tidak berani berteriak karena khawatir mengganggu istirahat pemilik rumah. Ia hanya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

mendorong pelaku untuk menghentikan perbuatannya. Beberapa waktu setelah itu, Agni lantas melaporkan kejadian tersebut kepada anggota KKN dan Dosen Pengawas Lapangan (DPL). Petelah melakukan beberapa dialog, pelaku kemudian dipulangkan dengan alasan tidak diterima lagi oleh anggota KKN lainnya. (https://www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/ diakses pada 5 Mei 2020).

Kasus pelecehan dan kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi tidak bisa dibilang sedikit. Kolaborasi Tirto, The Jakarta Post, dan Vice Indonesia dalam laporan #NamaBaikKampus mengumpulkan testimoni dari korban dalam lingkup perguruan tinggi melalui angket online. Dimulai sejak 13 Februari hingga 28 Maret 2019, mereka mendapati 174 kasus pelecehan seksual yang berhubungan dengan institusi perguruan tinggi. Testimoni diberikan oleh korban yang tersebar di 29 kota dan berasal dari 79 perguruan tinggi. Fenomena ini hanya gunung es yang belum diketahui jumlah sebenarnya (https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174korban79-kampus-29-kota-dmTW diakses pada 23 April 2020).

Dalam kasus perkosaan, media menjadikan perempuan sebagai objek pemberitaan. Mereka kerap dikonstruksi sebagai pihak yang salah dan marjinal dibanding pihak laki-laki (Eriyanto, 2008: 199). Dalam bukunya, Eriyanto (2008: 34 – 38) juga mengungkapkan, berita merupakan teks yang tidak netral. Ia merupakan hasil dari pertarungan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

wacana antara berbagai kekuatan dalam masyarakat yang selalu melibatkan pandangan dan ideologi wartawan. Sementara, media merupakan agen konstruksi sosial. Institusi ini mendefinisikan realitas sesuai dengan kepentingannya. Media memang medan pertarungan wacana berbagai kelompok. Namun, pada akhirnya kelompok dominanlah yang menguasai pembicaraan dan arena wacana.

Harian Kedaulatan Rakyat merupakan salah satu media yang gencar memberitakan kasus dugaan perkosaan terhadap Agni berikut perkembangan kasusnya. Keputusan redaksi menerbitkan dua editorial terkait kasus Agni peneliti nilai sebagai bentuk perhatian yang tinggi dari awak redaksi terhadap kasus kekerasan seksual di lingkungan perguruan tinggi.

Terbit kali pertama pada 27 September 1945 dan terus bertahan hingga hari ini, Kedaualatan Rakyat menjadi salah satu media massa tertua di Indoesia yang masih eksis. Sebagai media lokal, Kedaulatan Rakyat merupakan media yang paling mapan di Yogyakarta. Sirkulasi koran ini tidak sedikit. Berdasarkan data yang dihimpun Bagian Sirkulasi Kedaulatan Rakyat, total sirkulasi pada 2019 mencapai 49.426 ekslempar dengan lebih dari 85 persennya merupakan langganan. Sementara, merujuk pada hasil riset Litbang Kedaulatan Rakyat dan AC Nielsen 2019, jumlah pembacanya mencampai angka 145.554 dengan penyebaran di Yogyakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan, Sumatra, serta Bali (*Company Profile* Kedaulatan Rakyat 2020).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedaulatan Rakyat juga telah meraih banyak penghargaan, antara lain, Surat Kabar Harian Terbesar Greater Yogyakarta menurut Nielsen Media Research 2011, Surat Kabar Harian dengan pembaca terbanyak berdasarkan Nielsen Media Research 2011, koran paling efektif untuk beriklan versi Nielsen Media Research tahun 2011, media cetak lokal terbaik berdasarkan Cakram Award 2006, dan sejumlah penghargaan lainnya (Company Profile Kedaulatan Rakyat, 2015).

Berdasarkan data riset AC Nielsen pada Maret 2019, bahwa harian ini masuk dalam *Top 10 Newspaper in 11 Cities*. Kedaulatan Rakyat menempati urutan keempat setelah Jawa Pos, Kompas, dan Tribun Jabar. Di kandang, media cetak ini menang telak. Masih merujuk pada hasil riset AC Nielsen, Kedaulatan Rakyat berada di urutan pertama kategori *Top Newspaper in Greater Yogyakarta* dengan jumlah pembaca mencapai 103.000 orang. Angka ini jauh melampaui jumlah pembaca Tribun Jogja sebanyak 60.000 orang dan Harian Jogja sebanyak 18.000 orang (*Company Profile* Kedaulatan Rakyat 2020).

Sebagai salah satu media massa tertua yang masih bertahan dan telah memapankan diri berikut sejumlah penghargaan yang telah diraih, Kedaulatan Rakyat sudah semestinya tidak boleh lengah. Sebab, segudang capaian tersebut senantiasa diikuti tanggungjaawab yang besar terhadap publik. Salah satunya adalah dengan menyediakan konten yang dibutuhkan oleh khalayak, menjadi lidah sambung kaum marjinal, serta mencerminkan pluralitas masyarakat yang majemuk. Tidak terlepas dari

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

hal ini adalah bagaimana Kedaulatan Rakyat membangun kosntruksi sosial terhadap kaum perempuan.

Sementara itu, di sisi lain Agama Islam sendiri turun membawa misi keseteraan. Hadirnya Nabi Muhammad membebaskan penindasan kaum laki-laki terhadap perempuan yang banyak sekali terjadi saat itu. Hal ini didukung dengan pernyataan Alloh SWT. melalui surat Al Hujurat ayat 14 yang dengan jelas mengatakan,

يا ءيها الناس ءنا خلقناكم من ذكر وءنثى وجعلناكم شعوبا وقباءل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم

"Sesungguhnya telahaku ciptakan kalian laki-laki dan perempuan dan aku jadikan kalian berbangsa dan bersuku-suku agar saling mengenal; sesungguhnya yang muliah di antara kalian adalah yang paling bertakwa (Syamil Qur'an, 2012)."

Melihat masalah ini, peneliti bermaksud membedah konstruksi pemberitaan proses hukum dugaan kasus perkosaan yang menimpa Agni di harian Kedaulatan Rakyat. Peneliti menilai teori analisis wacana Sara Mills bisa menjadi pisau analisis yang tepat. Mills memiliki perhatian pada wacana feminisme: bagaimana perempuan ditampilkan dalam novel, film, foto, gambar, ataupun berita. Ia melihat bagaimana posisi aktor dimunculkan dalam teks. Posisi yang dimaksud adalah siapa yang menjadi subjek dan objek penceritaan, siapa yang mendefinisikan dan didefinisikan. Selain itu, perhatian Mills juga tertuju pada bagaimana penulis dan pembaca ditampilkan dalam teks. Hal ini meliputi bagaimana

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pembaca mengidentifikasi dan menempatkan dirinya (Eriyanto, 2008: 200).

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah pada penelitian di sini adalah Bagaimana konstruksi pemberitaan proses hukum dugaan kasus perkosaan terhadap Agni di harian Kedaulatan Rakyat dalam analisis Sara Mills?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Harian Kedaulatan rakyat mengkonstruksi pemberitaan proses hukum dugaan kasus perkosaan terhadap Agni menurut analisis Sara Mills.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan memperkaya kajian teks media, khususnya mengenai isu perempuan dan gender dalam media, di era banjir informasi.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam kajian komunikasi yang berorientasi pada penegakkan keadilan gender, serta menjadi referensi alternative bagi praktisi media, terutama wartawan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

E. Telaah Pustaka

Kajian teks terhadap naskah berita yang melibatkan perempuan telah banyak dilakukan oleh akademisi. Kajian tersebut berkaitan dengan berbagai kasus, seperti, korupsi, kekerasan dalam rumah tangga, dan pelecehan seksual. Hasil penelitian banyak berbentuk jurnal ataupun skripsi. Peneliti sangat terbantu dengan kajian teks yang telah hadir sebelumnya. Sehubungan dengan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan beberapa skripsi sebagai telaah pustaka.

Pertama, skripsi Aisyah Nur Syamsi berjudul "Analisis Wacana Si Barbie Masih Sendiri pada Laporan Utama di Majalah Tempo". Aisyah meneliti laporan utama Majalah Tempo edisi 10 dan 17 April 2011 dengan analisis wacana kritis Sara Mills. Sebagaimana dalam penelitian ini, skripsi tersebut mengungkap posisi subjek – objek dalam pemberitaan. Selain itu peneliti mengungkap bagaimana penulis dan pembaca diposisikan melalui teks.

Penelitian Aisyah menghasilkan temuan bahwa Melinda Dee, perempuan yang menjadi tersangka kasus penggelapan dan pencucian uang nasabah Citibank menjadi objek dalam narasi berita. Ia tidak bisa menceritakan dirinya sendiri. Dalam teks tersebut wartawan mengambil posisi sebagai subjek yang mendefinisikan Melinda Dee.

Pemberitaan kasus pencucian uang tersebut justru cenderung menonjolkan sisi sensual dan kehidupan pribadi Melinda Dee. Seperti, tersangka digambarkan sebagai perempuan cantik layaknya Barbie yang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

bisa menggaet nasabah berkantong tebal, perempuan yang pandai bersolek, perubahan ukuran payudara, hingga kehidupan glamour dan pernikahannya dengan artis tampan yang usianya lebih muda.

Penulis juga mengarahkan pembaca untuk berpikir bahwa Melinda Dee adalah perempuan penggoda yang menggunakan pesona, tubuh, dan posisinya sebagai *Senior Relationship Manager Citibank* untuk mendapatkan nasabah. Pembaca juga diarahkan untuk berpikir bahwa tindakan itu Melinda lakukan untuk memenuhi syahwat citra pigura, kehidupan glamour, serta memperbesar payudara Dalam hal ini, penulis menempatkan pembaca sebagai subjek yang bermoral (Nursyamsyi, Skripsi, 2019).

Kedua, skripsi Rifai Asyhari berjudul "Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Penganiayaan Anak oleh Ibu Tiri dalam Koran Jawa Pos". Menggunakan analisis Sara Mills, Fa'i menyimpulkan pemberitaan penganiayaan yang dilakukan oleh ibu tiri tersebut di hadapan ideologi patriarki yang dominan. Jawa Pos mengkonstruksi sosok ibu tiri sebagai perempuan yang menempati ruang dan wilayah domestik. Pemberitaan menjebaknya dalam kerangka pengiburumahtanggaan. Selain itu dia juga dilekati dengan stereotip materialis, ibu yang buruk, dan pengobjekkan.

Asih, nama ibu tiri tersebut, juga disubordinasi. Ia menjadi manusia kelas dua dalam rumah tangganya yang tidak bisa membuat keputusan sendiri. Rifa'i menyimpulkan Jawa Pos menempatkan sosok Asih dalam ideologi Patriarki (Asyhari, Skripsi, 2019).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pustaka ketiga adalah Jurnal Komunikasi Makna volume 2 no 1, Februari 2011, Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) berjudul "Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka" oleh Yuliyanto Budi Setiawan. Menggunakan pendekatan *critical discours analysis*, Yuliyanto meneliti pemberitaan tujuh jenis kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan itu antara lain, kasus kekerasan dalam pacaran (KDP), pelecehan seksual, perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), ekspolitasi prostitut perempuan, kekerasan terhadap buruh migran wanita, dan perdagangan perempuan.

Dalam analisisnya, Yuliyanto tidak menggunakan Sara Mills meskipun topik yang dibicarakan berkaitan dengan ideologi patriarkal dalam pemberitaan media massa, melainkan analisis Norman Fairclough. Berbeda dengan Mills yang mengkritik dan tidak menggunakan analisis Bahasa tradisional (penelitian bahasa dari struktur kalimat dan semantik), Fairclough menggunakan anlaisis bahasa. Hanya saja, penelitian Fairclough dilakukan dalam tiga level.

Pertama, microlevel yang memperhatikan gagasan atau kelompok dalam anak kalimat, kombinasi anak kalimat, serta rangkaian antarkalimat. Kedua mesolevel. Pada tingkatan ini penelitian dilakukan terhadap produksi dan konsumsi teks. Ketiga, macrolevel. Tingkatan ini meneliti aspek *sosiocultural* yang mempengaruhi produksi teks.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yuliyanto menyimpulkan, pemberitaan isu kekerasan terhadap perempuan di surat kabar harian Suara Merdeka mengandung bias gender dan membuat narasi yang memberi kesan tindak kekerasan terhadap perempuan sebagai sesuatu yang biasa. Hal itu ditemukan dalam penggunaan bahasa atau anak kalimat yang memuat bias gender. Seperti, "digilir", "digarap", "tutur Tyas perempuan bertubuh bahenol ukuran bra 36", "perempuan berparas manis tamatan SD", dan lainnya. Pada mesolevel, Yuliyanto mewawancarai pekerja media Suara Merdeka. Ia mendapati bahwa banyak reporter tidak memahami siu gender dan bahkan ada yang belum pernah mengikuti *workshop* tentang gender. Mereka juga menganggap pemberitaan semacam itu sebagai hal yang wajar. Pada macrolevel, Yuliyanto mendapati tulisan yang mengusung wacana ideologi patriarkal merupakan cerminan dari masyarakat patriarki. Hal ini dikarenakan pemilihan dan penulisan berita mempertimbangkan selera khalayak. Ideologi ini juga tertanam di awak redaksi yang kebanyakan berjenis kelamin laki-laki (Setiawan, *Jurnal Komunikasi Makna*, Februari 2011: 13 – 19).

Tabel 1 Matrix Tinjauan Pustaka

No	Peneliti/Instansi	Jenis	Judul Penelitian	Metode	Persamaan	Perbedaan
1.	Rifa'i Asyhari, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga Yogayakrta, 2019	Skripsi	Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Penganiayaan Anak oleh Ibu Tiri dalam Koran Jawa Pos	Deskriptif Kualitatif	Mengkaji tentang analisis wacana model Sara Mills	Penelitian dilakukan terhadap pemberitaan koran Jawa Pos

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

2.	Aisyah Nursyamsi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta, 2019	Skripsi	Analaisis Wacana Si Berbie Masih Sendiri di Laporan Utama Majalah Tempo	Deskriptif Kualitatif	Mengkaji tentang analisis wacana model Sara Mills	Penelitian dilakukan terhadap pemberitaan di Laporan Utama Majalah Tempo
3.	Yuliyanto Budi Setyawan, Universitas Islam Sultan Agung, Smearang, 2011	Jurnal	Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka/ volume 2 no 1, Februari 2011	Deskriptif Kualitatif	Mengkaji tentang analisis wacana	Menggunakan model analisis wacana Norman Fairclough Penelitian dilakukan terhadap SKH Suara Merdeka

Sumber: Olahan Peneliti

F. Landasan Teori

1. Realitas, Media, dan Berita Menurut Konstruksionis

Menurut konstruksionis, realitas kehidupan sosial bukanlah hal yang alamiah. Pengetahuan bersama suatu masyarakat yang dianggap sebagai kewajaran dan didudukkan sebagai kenyataan penting untuk dianalisis. Hal ini, sebagaimana diungkapkan lebih lanjut oleh sosiolog interpretatif Peter L. Berger, dikarenakan fakta sosial dalam tatanan masyarakat tersebut, yang dianggap wajar dan tidak dicurigai, merupakan konstruksi yang dibangun oleh kelompok tertentu.

Burhan Bungin (2015: 15) menuturkan bahwa bagi konstrukstivisme, realitas objektif dibangun melalui interaksi subjektif individu-individu. Berger dan Luckman berpendapat bahwa konstruksi

sosial terbentuk dari dialektika antara diri dengan masyarakat melalui tiga momen, yakni eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi yang berproses secara simultan. Eksternalisasi merupakan hal paling mendasar dalam proses konstruksi sosial, di mana, seorang individu menyesuaikan diri dengan dunia sosio kultural sebagai produk manusia. Selanjutnya, obyektivasi merupakan interaksi sosial yang terjadi dalam dunia intersubyektif yang dilembagakan. Dalam proses ini, yang juga sangat penting, bahasa merupakan komponen utama interaksi subyektif individu. Dalam proses ini pula manusia melakukan proses signifikasi, yakni pembuatan tanda-tanda. Penandaan ini juga berfungsi sebagai jembatan yang menghubungkan manusia dengan realitas yang didefinisikan dengan simbol-simbol. Terakhir, internalisasi merupakan proses di mana individu melakukan identifikasi diri dengan lembaga atau organisasi sosial di mana ia berada.

Namun, konsepsi Berger dan Luckman yang dibangun pada kurun 1960 an tidak memasukkan media massa sebagai variabel yang berperan dalam konsturksi sosial. Penyebabnya, saat itu media massa dipandang belum memiliki peran yang signifikan. Sementara itu, proses konstruksi sosial sendiri berlangsung lama, terpisah-pisah, membutuhkan waktu, serta berlangsung secara hierarkis-vertikal, seperti yang terjadi pada kiai dengan santri, petinggi dengan bawahan, guru dan murid, serta lainnya. Melalui lubang inilah kritik Burhan Bungin masuk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Menggunakan kajian komunikasi massa, Bungin (2015: 40 – 43) melakukan kritik terhadap Berger dan Luckman. Menurutnya, dalam konstruksi sosial yang berlangsung secara luas dan jamak, terdapat peran media sebagai instrumen komunikasi massa. Media menyampaikan pesan kepada khalayak dalam jumlah banyak secara serentak menggunakan medium bahasa atau simbol untuk membangun makna, citra, dan kesadaran terhadap sebuah realitas sosial. Simbol-simbol tersebut merupakan simbol yang menjadi acuan masyarakat.

Dengan demikian, media massa melakukan interaksi yang bersifat simbolis dengan individu-individu. Interaksi ini turut berperan dalam proses eksternalisasi yang membentuk kesadaran individu terhadap realitas sosial bentukan media massa. Pada tahap selanjutnya, interaksi ini juga mempengaruhi individu dalam melakukan keputusan sosial serta perilakunya dalam proses internalisasi yang sarat akan konstruksi. Artinya, media massa turut serta dalam membentuk kesadaran individu atas realitas berikut tindakannya. Dalam hal ini bisa berbentuk keputusan memilih produk atau opini publik yang diutarakan dalam merespon suatu fenomena sosial.

Sebenarnya, terdapat perbedaan mendasar dalam konsep konstrusksi sosial Berger dan Luckman dengan kritik yang dibangun Bungin dalam bukunya, di mana ia menggunakan konsepsi konstruksi sosial Berger dan Luckman untuk menjelaskan konstruksi sosial media massa. Konsepsi mereka menempatkan individu sebagai pencipta realitas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sosial yang dikonstruksikan dalam setiap tahap konstruksi yang berlangsung secara dialektis antara individu dan masyarakat melalui tiga tahapan di atas. Tidak terdapat celah bagi aktor lain untuk terlibat dalam dialektika ini. Padahal manusia secara jelas bisa menciptakan teknologi yang kemudian memiliki fungsi sendiri di luar fungsi manusia.

Dalam konteks masyarakat yang erat kaitannya dengan perkembangan teknologi, konsepsi Berger dan Luckman kurang relevan. Konstruksi sosial mereka menjadi relatif dan mudah disangkal. Dalam konsepsi Bungin, konstruksi sosial media massa menempatkan individu sebagai subjek sekaligus objek konstruksi sosial. individu ini melakukan konstruksi serta mendekonstruksi produk media massa.

Lain dari itu adalah konstruksi sosial Berger dan Luckman membuat pengetahuan individu dikuasai negara. Sementara Bungin, yang melihat bahwa media massa merupakan instumen kapitalisme, menyatakan bahwa dominasi moral dan intelektual atas individu atau yang disebut sebagai hegemoni oleh Gramsci, dilakukan oleh kapitalisme.

Dalam kritik yang dibangun Bungin (2015: 194), media massa merupakan sangat substansi dalam proses eksternalisasi, obyektivasi, dan internalisasi. Sifat dan kelemahan media massa menambal kekurangan konstruksi sosial yang berjalan lamban. Substansi kritik Bungin adalah kecepatan dan keluasan sirkulasi informasi yang mengakibatkan konstruksi sosial berlangsung cepat dengan sebaran yang luas. Realitas

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang terkonstruksi juga membentuk opini massa, massa cenderung apriori dan opini massa cenderung sinis.

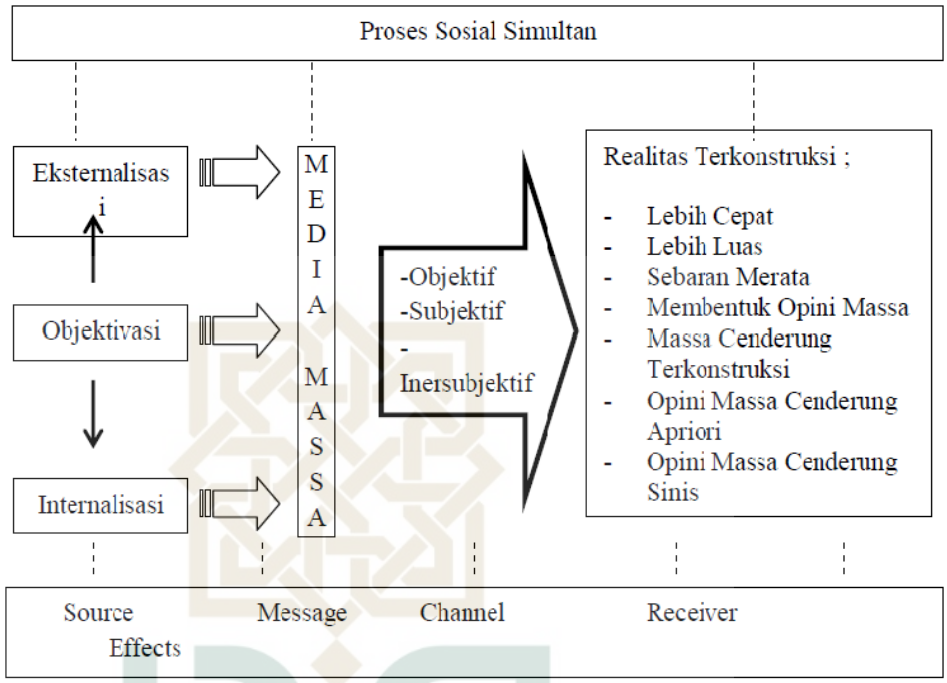

Bagan 1 Proses Konstruksi Sosial Media Massa

Sumber: Burhan Bungin, Konstruksi Sosial Media Massa

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Konstruksi sosial media massa meskipun berlangsung cepat dan luas, memiliki tahapan yang harus dilalui. Burhan Bungin (2015: 195 – 200) menjelaskan proses tersebut dalam beberapa tahapan berikut.

a. Tahap Menyiapkan Materi Konstruksi

Tahap menyiapkan materi ini merupakan tugas redaksi media massa. Kerja-kerja ini diamanatkan kepada desk editor. Sebenarnya, setiap media memiliki desk berbeda-beda, bergantung kebutuhan dan visi media tersebut. Secara umum, media massa memiliki isu penting yang menjadi fokus produksi mereka setiap

hari, yang berhubungan dengan tiga aspek, yaitu, takhta, harta, dan perempuan. Takhta berkaitan dengan kedudukan politik. Hal ini berkelindan dengan kebijakan yang menentukan nasib banyak pihak. Harta berkaitan dengan kekayaan, kemewahan, korupsi, dan tentu saja ekonomi. Sementara, perempuan menyangkut perihal aurat, perempuan cantik dan aktivitasnya. Lain dari tiga hal tersebut adalah segala hal yang mengandung sensitivitas, sensualitas, ataupun kengerian.

Dalam tahap ini terdapat tiga hal penting yang harus diperhatikan. Pertama, keberpihakan media massa kepada kapitalisme. Media massa beroperasi dengan logika kapitalisme. Dalam kerja-kerjanya terdapat perputaran uang dan pelipatgandaan modal. Kedua, keberpihakan semu terhadap masyarakat. Ketika media massa menunjukkan empatinya kepada masyarakat, semisal meliput bencana alam atau tragedi lainnya, tidak bisa diartikan sebagai kepedulian sosial semata. Media massa melakukan itu dengan tujuan mendapatkan rating atau sirkulasi yang lebih besar. Dengan demikian, logika kapitalismelah yang menggerakkan kerja-kerja media massa, alih-alih empatinya kepada publik. Ketiga, keberpihakan kepada kepentingan umum. Dalam arti sebenarnya, keberpihakan ini merupakan visi setiap media massa. Namun, belakangan hanya menjadi slogan yang tidak mewujud secara nyata.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Secara umum, dalam tahap menyiapkan materi konstruksi, media massa berpijak pada tiga hal tersebut. Namun, kepentingan kapitalisme lah yang menjadi dominan. Bahkan, tidak jarang suatu pemberitaan merupakan bentuk pertukaran kepentingan antara beberapa pihak, seperti politisi, partai, atau pengusaha.

b. Tahap Sebaran Konstruksi

Tahap ini umumnya dilakukan menggunakan prinsip *real time*. Prinsip ini berartit disiarkan secara langsung atau sesegera mungkin. Karena sifat setiap platform media massa berbeda, maka bentuk dari implementasi prinsip ini tidak sama. Pada media televisi dan internet, prinsip ini bisa diwujudkan dalam siaran langsung. Sementara, pada media cetak prinsip ini bisa beerarti satu hari, satu minggu, atau bahkan satu bulan. Meskipun konsep *real time* media cetak tertunda, nilai aktualitas tetap menjadi pertimbangan utama.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Sebaran konstruksi media massa pada umumnya berlangsung satu arah. Beberapa media memang bisa melakukan komunikasi dua arah dengan khalayak. Namun, agenda setting konstruksi tetap didominasi oleh media massa.

c. Tahap Pembentukan Konstruksi Realitas

Setelah tahap sebaran konstruksi media massa, terdapat tehap pembentukan konstruksi realitas dan pembentukan konstruksi citra. Setelah tersebar, konstruksi yang berlangsung di

masyarakasat melalui tiga tahap generik. *Pertama*, konstruksi pembenaran. Kosntruksi ihhni merupakan bentuk konstruksi media yang terbangun di masyarakat yang cenderung membenarkan apa saja yang disuguhkan oleh media massa sebagai relaitas kebenaran. Artinya, informasi media massa menjadi dasar dari sikap untuk membenarkan suatu kejadian. *Kedua*, kesediaan dikonstruksi oleh media massa. Keputusan seseorang untuk menjadi pembaca atau pemirsa merupakan sebab dari pilihannya bersedia di konstuksi oleh media massa. *ketiga*, menjadikan media massa sebagai kebutuhan pokok. Seseorang memiliki ketergantungan pada media massa.

d. Tahap Konstruksi Citra

Pembentukan citra merupakan bentuk yang diinnginkan pada tahap konstruksi. Media massa membangun konstruksi citra ini dalam dua model, yakni *good news* dan *bad news*. Model *good news* merupakan kecenderungan mengkonstruksi pemberitaan sebagai sesuatu yang memiliki citra baik. Dampaknya, model ini memunculkan kesan yang lebih baik dari kebaikan sebenarnya yang dimiliki objek tersebut. Sementara, *bad news* cenderung mengkonstruksi keburukan, sehingga objek yang diberitakan terkesan lebih buruk, lebih jahat, dan citra negatif lainnya. Dalam pemberitaannya, media massa memiliki tujuan tertentu, berkaitan dengan pencitraan di atas. Sebagai contoh, dalam kasus kriminal

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pemberitaan model *bad news* mengakibatkan terbentuknya citra penjahat, penipu, terdakwa, dan lainnya pada diri objek berita.

e. Tahap Konfirmasi

Tahap terakhir dari proses ini adalah ketika masing-masing pihak baik dari media ataupun khalayak untuk memberikan argumentasinya terkait dengan keterlibatan mereka dalam proses konstruksi sosial. Media membutuhkan ini sebagai untuk memberi alasan terhadap konstruksi sosial. Sementara bagi khalayak, hal ini diperlukan untuk menjelaskan alasan ia terlibat dan bersedia hadir dalam proses konstruksi sosial.

2. Berita

Berita merupakan informasi yang beersifat faktual, menarik dan penting bagi sebagian masyarakat, yang disebarluaskan melalui media massa seperti radio, surat kabar, televisi, internet, dan lainnya. Setiap berita memiliki nilai berita. Dalam bentuknya, berita secara umum terbagi menjadi dua, yakni *hardnews* dan *softnews*.

Perbedaan keduanya terletak pada nilai dan gaya penulisan berita. *Hardnews* memiliki nilai aktualitas yang relatif pendek sehingga informasi yang diolah wartawan harus disebarkan dengan segera. Dalam gaya penulisannya, berita ini menyajikan informasi terpenting pada bagian awal tulisan. Sehingga, pembaca dapat langsung menangkap informasi yang hendak disampaikan wartawan. Metode penulisan berita ini menggunakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konsep piramida terbalik, di mana dalam penyajian informasi ditentukan oleh derajat kepentingan informasi tersebut.

Berbeda dengan *hardnews* yang serba cepat dan *to the point*, *softnews* merupakan jenis berita yang disampaikan secara santai. Nilai aktualitas pada berita ini juga lebih panjang. Dalam berita ini informasi disajikan dengan tidak menggunakan piramida terbalik, melainkan piramida tidak terbalik. Informasi disajikan dengan lebih santai di mana informasi paling penting bisa diletakkan di tengah atau akhir tulisan. Umumnya, jenis berita ini digunakan untuk menyampaikan informasi yang bersifat menghibur atau menggugah sisi emosional manusia. Meski demikian, gaya penulisan jenis berita ini juga kerap digunakan untuk menyampaikan fakta-fakta penting dan berdampak besar seperti laporan investigasi (Sumaidiria, 2006: 65).

2. Nilai Berita

Tidak semua fakta bisa diangkat menjadi berita. Suatu fakta mesti memiliki nilai (*value*). Nilai inilah yang akan menjadi salah satu unsur intrinsik suatu berita, yang menentukan apakah suatu berita dinilai layak (Ishwara, 2000: 53).

Luwi Ishwara (2000: 53) menyebutkan beberapa nilai berita, antara lain:

a. Keluarbiasaan (*unusualnews*)

Suatu fakta yang tidak biasa memiliki nilai untuk diangakat menjadi berita. Penjelasan klasik mengenai konsepsi ini adalah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

pernyataan pujangga Inggris abad 18 Lord Northchlife yang mengatakan bahwa apabila seseorang digigit anjing bukanlah berita. Tapi, apabila seseorang menggigit anjing maka itulah berita. Konsepsi ini mensyaratkan suatu peristiwa yang luar biasa, seperti, bencana besar yang menewaskan banyak orang, tragedi, dan sebagainya.

b. Kebaruan (*newness)*

Segala sesuatu yang baru memiliki nilai berita. Seperti, presiden baru, bahan bakar baru, teknologi baru, penyakit baru, dan sebagainya.

c. Dampak (*impact*)

Segala peristiwa yang berdampak pada masyarakat banyak akan selalu memiliki nilai berita. Seperti, bencana alam, kecelakaan pesawat yang terus berulang, kenaikan BBM dan sebagainya.

d. Kedekatan (*proximity*)

Kedekatan merujuk pada dua bentuk, yakni kedekatan geografis dan psikologis. peristiwa yang terjadi dan memiliki kedekatan secara fisik dengan suatu khalayak dari media massa. Seperti, fasilitas perpustakaan di suatu kampus yang tidak memadai dan tidak ruang publik di kampus yang tidak ramah memiliki nilai berita bagi mahasiswa kampus tersebut. Sementara, kedekatan psikologis berkaitan dengan perasaan publik yang bisa terhubung karena

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

adanya persamaan agama, ras, atau sekadar rasa kemanusiaan. Hal ini seperti genosida terhadap umat Islam di Myanmar memiliki kedekatan dengan perasaan umat Islam di Indonesia, atau isu rasisme di Amerika Serikat yang kahirnya memicu demonstrasi Black Lives Matters di berbagai belahan dunia.

e. Konflik

Perselisihan antara dua orang atau suatu kelompok kerap menarik perhatian publik. Perselisihan ini bisa berbentuk perdebatan politisi, sipil dengan negara, hingga peperangan.

f. Tokoh (*prominence*)

Hal-hal yang berkaitan dengan tokoh atau orang penting hampir senantiasa menjadi berita. Hal ini seperti tetangga kita naik becak dan terjungkir bukanlah berita. Tetapi berbeda jika yang terjungkir ketika naik becak adalah mantan Presiden Megawati Soekarno Putri.

g. *Human Interest*

Segala sesuatu yang menarik hati atau menggugah hati manusia memiliki nilai berita. Hal ini seperti, sosok yang menyedihkan atau menginspirasi, serta yang berkaitan dengan rasa kemanusiaan.

h. Seks

Salah satu hal yang menjadi perhatian manusia sepanjang masa adalah seks. Peristiwa yang berkaitan dengan seksualitas kerap diangkat menjadi berita. Seperti, terbongkarnya skandal seks, prostitusi, perkosaan, dan sebagainya.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

3. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik (KEJ) merupakan himpunan etika kewartawanan. Kode etik ini disusun oleh organisasi wartawan dan ditetapkan oleh Dewan Pers. Dewan pers merupakan lembaga independen yang didirikan pasca reformasi untuk mengembangkan kemerdekaan pers dan meningkatkan kehidupan pers nasional.

Dalam sejarahnya, kode etik terus berkembang. Mulanya, KEJ disusun oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), yang merupakan salah satu organisasi wartawan tertua. KEJ terus mengalami perbaikan hingga pada 2006 Dewan Pers menerbitkan Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (KEJ DP). Kode etik ini disetujui sebagian besar asosiasi wartawan cetak dan elektorinik, serikat penerbitan pers, dan asosiasi televisi seluruh Indonesia (ATSI). KEJ DP disahkan pada 14 Maret 2006 di Jakarta dan ditandatangani oleh 20 organisasi kewartawanan (Hikmat, 2018: 109 – 111).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Adapun kode etik jurnalistik yang relevan dengan penelitian ini adalah pasa 1 yang berbunyi, “Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk”. Adapun penafsirannya adalah sebagai berikut.

a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.

b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objek ketika peristiwa terjadi.

c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.

d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

4. Gender

Hal pertama yang penting dipahami dari topik perbedaan gender adalah perbedaan antara konsep gender dan seks (jenis kelamin) yang kerap kabur dalam masyarakat. Pemahaman perbedaan gender ini penting karena melahirkan ketidakadilan berbasis gender dalam waktu yang sangat lama.

Mansour Fakih (2013: 7 – 15), mengemukakan, seks merupakan identifikasi yang melekat pada manusia berdasarkan biologisnya. Perbedaan ini kentara dan mudah disepakati banyak orang. Hal tersebut meliputi bahwa laki-laki adalah manusia yang memiliki penis, jakun, janggut, dan memproduksi sperma. Sementara perempuan ditandai dengan kepemilikan vagina, rahim, payudara, serta kemampuan memproduksi sel telur. Sifat biologis tersebut tidak dapat dipertukarkan dan berlaku selamanya. Hal ini berarti bahwa identifikasi seks merupakan sesuatu yang kodrati. Berbeda dengan seks, gender merupakan konsepsi yang bersifat kultural. Artinya, konsep gender dan perbedaannya merupakan hasil dari dialektika yang terjadi dalam masyarakat. Identifikasi gender kerap dilekatkan pada jenis seks manusia. Hal itu seperti, bahwa laki-laki

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

itu kuat perkasa, rasional, tampan, dan tegas. Sementara, perempuan itu lemah, lembut, cantik, emosional, dan keibuan. Tidak seperti seks, gender merupakan konsepsi yang bisa ditukar. Dalam waktu tertentu di suatu masyarakat konsepsi terhadap laki-laki dan perempuan bisa berbeda dengan konsepsi dalam masyarakat lain pada waktu yang berbeda.

Perbedaan konsep gender ini telah berjalan sangat lama dan semakin mapan karena terus disosialisasikan, diperkuat, dan bahkan dikonstruksikan secara kultural maupun kultural. Konstruksi gender tidak saja dilakukan masyarakat dalam interaksi sosial sehari-hari, melainkan juga dilakukan oleh negara. Karena dilakukan dalam waktu yang sangat lama, konsepsi ini pada akhirnya dianggap sebagai sesuatu yang kodrati.

Dampak lain dari hal ini adalah bahwa konstruksi yang dilakukan dalam waktu yang sangat lama tersebut perlahan-lahan mempengaruhi sisi biologis manusia. Seperti, karena laki-laki dikonstruksikan sebagai sosok yang perkasa, seorang laki-laki melakukan upaya-upaya agar menjadi perkasa. Sebaliknya, perempuan karena dikosntruksi lemah lembut sejak lahir hidupnya diarahkan untuk menjadi sosok yang lemah lembut.

Perbedaan gender, sebenarnya tidak perlu dipersoalkan selagi tidak melahirkan ketidakadilan gender. Namun, pada kenyataannya dalam masyarakat konsepsi tersebut melahirkan kelompok yang dominan dan didominasi. Hal ini bisa dilihat dari manifestasi ketidakadilan gender berikut.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pertama, marginalisasi perempuan. Marginalisasi merupakan fenomena yang jamak dan bisa menimpa kaum laki-laki maupun perempuan. Namun, terdapat marginalisasi yang menyasar pada jenis kelamin tertentu—dalam hal ini perempuan. Peminggiran terhadap kaum perempuan banyak kita temukan di masyarakat. Seperti, bahwa perempuan kerap tidak memiliki hak pendapat yang sama dengan laki-laki, tidak pantas menjadi pemimpin politik, dan tidak masuk kualifikasi pekerjaan tertentu.

Marginalisasi terhadap perempuan sudah dimulai sejak dalam rumah tangga. Hal ini seperti, bahwa perempuan tidak pantas bekerja yang pada akhirnya melahirkan stereotip kaum yang bergantung pada pria, tidak mendapatkan hak waris yang sama dengan laki-laki, dan sebagainya. Sumber marginalisasi ini beragam, dari budaya, ekonomi, hingga tafsir atas teks-teks agama.

Kedua, subordinasi. Perempuan dipandang sebagai warga kelas dua di bawah laki-laki. Mereka menjadi sasaran stereotip sebagai sosok yang emosional, tidak rasional, sehingga tidak bisa memegang tongkat kepemimpinan. Akhirnya, perempuan menempati posisi yang tidak strategis dalam tata kelola masyarakat. Karena posisi tersebut, mereka tidak bisa memberikan kontribusi secara signifikan dalam masyarakat. Hal lain yang sangat disayangkan adalah, dalam tradisi Jawa, pernah ada aturan tidak tertulis bahwa jika keluarga mengalami masalah ekonomi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

sehingga tidak bisa menyekolahkan semua anaknya, maka anak laki-lakilah yang berhak mendapatkan akses pendidikan

Ketiga, stereotip. Stereotip merupakan pelabelan yang bersifat subjektif. Pelabelan ini kadang menyasar pada suku atau ras. Seperti orang Batak berwatak keras, Jawa lembut, dan Sunda materealis. Pelabelan ini juga menyasar kaum perempuan. Anggapan bahwa mereka lemah, tidak rasional, emosional, merupakan label yang pada akhirnya membuat mereka tidak mendapatkan akses yang sama dengan kaum laki-laki dan akhirnya mengalami subordinasi.

Keempat, kekerasan. Kekerasan merupakan serangan terhadap fisik ataupun psikis. Salah satu dari sekian banyak sumber kekerasan adalah ketidakadilan gender. Ketidaksetaraan kekuatan dalam masyarakat mengakibatkan munculnya kekerasan berbasis gender

Selanjutnya, adalah beban kerja. Beberapa pekerjaan kerap diasosiasikan sebagai pekerjaan perempuan. Dalam kehidupan keluarga, hal ini meliputi pekerjaan rumah tangga seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Perempuan yang terjebak dalam kerangka domestifikasi ini tidak jarang juga memiliki beban lain, yakni harus bekerja karena ketidakmampuan ekonomi. Konsepsi ini membuat perempuan harus menanggung beban ganda (Fakih, 2013: 13 – 23).

Pemahaman atas bentuk kekerasan ini berkembang seiring banyaknya penelitian yang dilakukan. Komisi Nasional Perempuan menerbitkan *booklet* berisi 15 bentuk kekerasan seksual

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

(https://www.komnasperempuan.go.id/read-news-kekerasan-seksual-kenali-dan-tangani-15-bentuk-kekerasan-seksual diakses pada 24 April 2020). Daftar tersebut belum final karena masih memungkinkan bentuk kekerasan lain yang belum diketahui. Berikut adalah 15 bentuk kekerasan seksual menurut Komnas Perempuan.

Pertama, perkosaan. Perkosaan didefinisikan sebagai serangan menggunakan penis terhadap vagina, mulut, atau anus korban. Serangan menggunakan tangan atau benda lainnya juga masuk dalam kategori ini. Serangan dilakukan dengan kekerasan, ancaman, tekanan psikologis, penyalahgunaan kekuasaan, atau dengan mengambil kesempatan dari lingkungan yang penuh paksaan. Pencabulan merupakkan tindakan perkosaan di luar penetrasi terhadap korban dalam pemaksaan seksual. Pencabulan merupakan istilah lain dari perkosaan yang dikenal dalam hukum Indonesia. Biasanya digunakan pada korban yang belum bisa memberikan persetujuan seara utuh, seperti pada anak di bawah 18 tahun.

Kedua, Intimidasi seksual termasuk ancaman atau percobaan perkosaan. Serangan terhadap seksualitas untuk menimbulkan rasa takut atau penderitaan psikis korban. Tindakan ini bisa dilakukan dalam bentuk fisik maupun pernyataan yang disampaikan melalui lisan, pesan surel, dan lainnya. ancaman atau percobaan perkosaan termasuk dalam kategori ini.

Ketiga, pelecehan seksual. Tindakan seksual lewat sentuhan fisik ataupun non fisik terhadap organ seksual ataupun sisi seksualitas korban. Termasuk dalam hal ini adalah siulan, main mata, pernyataan yag bersifat

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

seksual, mempertunjukkan materin pornografi atau keinginan seksual, colekan, gerakan atau isyarat yang menunjukkan seksualitas dan berdampak pada rasa tidak nyaman korban, merasa direndahkan, atau bahkan masalah kesehatan dan keselamatan.

Keempat, eksploitasi seksual. Tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang timpang, penyalahgunaan kepercayaan, maupun memperoleh keuntungan dalam benrtuk materil seperti uang atau lainnya. Dalam banyak kasus, ekspoloitasi ini berkaitan dengan kemiskinan perempuan sehingga masuk dalam kategori pornografi atau prostitusi.

Kelima, perdagangan perempuan untuk tujuan seksual. Merupakan tindakan merekrut, menyekap, mengangkut, mengirim, dan beragam pemaksaan lainnya terhadap perempuan untuk tujuan prostitusi atau eksploitasi seksual lainnya.

Keenam, prostitusi paksa. Merupakan tindakan pemaksaan melalui penculikan, jerat hutang, ataupun penipuan untuk menjadi pekerja seks. Meskipun prostitusi paksa memiliki kemiripan dengan perdagangan perempuan untuk seksual dan perbudakan seksual, jenis ini tetap berbeda dari keduanya.

Ketujuh, perbudakan seksual. Situasi di mana pelaku merasa memiliki kuasa atas tubuh korban sehingga dia merasa berhak melakukan apapun termasuk pemerkosaan dan kekerasan seksual lainnya. termasuk dalam hal ini adalah anak-anak dalam keadaan pernikahan yang dipaksa, penyekapan, atau kerja paksa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kedelapan, pemaksaan perkawinan termasuk cerai gantung. Pemaksaan perkawinan masuk dalam jenis kekerasan seksual karena tindakan ini tidak terlepas dari pemaksaan hubungan seksual. Termasuk dalam hal ini adalah korban pemerkosaan yang dipaksa menikah dengan pelakunya.

Kesembilan, pemaksaan kehamilan. hal ini terjadi ketika perempuan dipaksa untuk melanjutkan kehamilan (semisal dia korban perkosaan) ataupun larangan penggunaan alat kontrasepsi oleh suami terhadap istrinya.

Kesepuluh, pemaksaan aborsi. Pengguguran kandungan karena tekanan, ancaman, ataupun paksaan dari pihak lain.

Kesebelas, pemaksaan kontrasepsi. Penggunaan alat kontrasepsi secara sepihak karena perempuan tidak mendapat informasi yang utuh atau tidak mengerti hukum.

Keduabelas, penyiksaan seksual. Tindakan menyerang secara khusus terhadap organ seksual. Hal ini dilakukan untuk memperoleh keterangan ataupun sebagai bentuk hukuman.

Ketigabelas, penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual. Tindakan menghukum yang menyebabkan rasa takut, sakit, atau malu yang luar biasa, sehingga tidak bisa tidak merupakan penyiksaan. Termasuk dalam hal ini adalah hukuman yang mempermalukan dan merendahkan martabat korban di depan umum, seperti hukuman cambuk.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keempatbelas, praktik atau tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau nendiskriminasi perempuan. Kebiasaan masyarakat yang bertopang pada adatataupun dalih agama yang dapat menimbulkan cedera fisik, seksual, ataupun psikologis. Dalam hal ini adalah sunat terhadap kaum perempuan dalam Islam yang sebenarnya berdasar pada hadits *dhoif*.

Kelimabelas, kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan agama dan moralitas. Hal ini timbul cari cara pikir masyarakat yang memandang perempuan sebagai simbol kesucian mereka. Karena itu muncul standarisasi yang mengacu pada konsepsi "perempuan baik-baik". Termasuk dalam hal ini adalah pemaksaan busana tertentu, pemberlakuan jam malam terhadap perempuan, larangan di satu tempat dengan lawan jenis tanpa adan ikatan *mahrom*, serta aturan tentang pornografi yang lebih melandaskan pada persoalan moralitas daripada kekerasan seksual.

5. Gender dalam Islam

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Perempuan menjadi warga atau kelompok kelas dua tidak hanya dijumpai dalam sosio kultural masyarakat. Fenomena ini juga kerap terlihat dalam agama. Hal ini disebabkan karena penafsiran atas teks agama yang dipengaruhi kultur patriarki.

Penting dipahami, agama Islam diturunkan dengan membawa spirit kesetaraan. Ali Asghar Engineer (1992) mengungkapkan, sejarah telah mencatat bagaimana perempuan pada masa *jahiliyyah* diposisikan dengan sangat tidak terhormat. Hal ini seperti ketika seorang suami meninggal

maka jandanya akan menjadi milik saudara laki-laki suami tersebut. Catatan lain adalah pada masa itu orang-orang arab kerap mengubur bayi perempuan karena menganggapnya sebagai aib. Bagaimana martabat perempuan pada zaman itu juga bisa dilihat dari ketidakterbatasan suami memiliki istri (dalam Fakih, 2013: 129).

Muhammad As'ad (1980) menyatakan, pada dasarnya, dalam Al Qur'an yang menajadi pedoman umat Islam, perempuan memiliki posisi yang setara dengan laki-laki. Keduanya tercipta dari satu *nafs* (living entity), di mana yang satu tidak mengungguli yang lain. Perempuan—dalam konteks rumah tangga—memiliki hak dan kewajiban yang mesti dipenuhi dan diberikan kepada laki-laki. Begitupun laki-laki terhadap perempuan. Kedudukan yang sama ini juga ditemukan dalam hak ekonomi. Seorang suami tidak diperbolehkan mengambil hak guna ataupun milik atas mahar yang telah menjadi hak istri (dalam Fakih, 2013: 129 – 130).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Pemikiran dan tradisi keagamaan yang bias gender muncul tidak bisa terlepas dari kultur Timur Tengah pada abad pertengahan yang sangat patriarki. Konsep perempuan ideal yang ditulis oleh Sheikh Nefzawi (1964)—sebagaimana dikutip oleh Asghar Ali Engineer (1992)—menggambarkan pandangan masyarakat pada masa itu, antara lain, bahwa perempuan ideal adalah yang jarang bicara atau tertawam tidak meninggalkan rumah, tidak memiliki teman perempuan, dan tidak percaya siapa saja kecuali suaminya. Seorang istri mesti hanya menyerahkan

dirinya kepada suaminya, meskipun kostrol akan membunuhnya. Perempuan seperti itulah yang dihormati semua orang.

Pandangan semacam ini masih berlaku pada sebagian kelompok muslim dan tidak pada yang lain. Pandangan yang mendudukkan laki-laki di atas perempuan seakan juga mendapatkan legitimasi dari Al Qur'an. Ayat yang dimaksud adalah *ar rijaalu qowwaamuuna ngalan nisaa'* yang kerap diartikan bahwa kedudukan laki-laki berada di atas perempuan. Asghar ali engineer dalam Mansour Fakih mengusulkan bahwa ayat tersebut mestinya dipahami sebagai gambaran tata masyarakat pada masa itu, bukan sebagai norma ajaran. Hal ini karena agama Islam merubah tatanan yang sudah mapan secara gradual.

Selain itu, ayat tersebut juga mesti dipahami secara kontekstual. Diceritakan bahwa sahabat Nabi bernama Saad bin Rabi menampar istrinya, Habibah bin Zaid. Tidak terima atas perlakuan yang diterimanya, Habibah mengadu kepada Nabi. Nabi memutuskan agar Habibah membalas perlakuan suaminya. Keputusan ini membuat gempar penduduk Madinah dan menyulut protes dari kalangan laki-laki. Berdasarkan asbabun nuzul tersebut, surat An Nisa ayat 35 mestinya dipahami bukan sebagai superioritas laki-laki atas perempuan, melainkan semangat pengurangan tindak kekerasan terhadap kaum perempuan melalui anjuran pemilihan hakim untuk menyelesaikan perselisihan (dalam Fakih, 2013: 131 – 133).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

6. Hukum Bias Gender

Ketimpangan sosial berdasarkan perbedaan gender telah mengakar begitu lama sehingga mempengaruhi berbagai bentuk hubungan sosial. Lebih jauh, ketidakadilan gender ini telah meresap pada organisasi sosial, termasuk lembaga hukum negara. Dampaknya, perempuan, baik sebagai korban atau pelaku, kerap tidak mendapatkan perlakuan yang adil di depan hukum. Menurut Firestone (1972) Perspektif laki-laki telah masuk ke dalam berbagai aspek kehidupan yang memperlihatkan bias-bias dalam pola organisasi sosial (dalam Dzuhayatin, Pitaloka, dan Abdullah, *Populasi*, 12, 2001: 47).

Dalam kasus kekerasan terhadap perempuan (KTP), korban justru kerap dipojokkan dengan memposisikannya sebagai penyebab. Mereka diposisikan sebagai pihak yang menstimulasi terjadinya tindak kekerasan. Posisi stimulatif ini banyak ditemukan dalam proses penanganan litigatif. Korban kerap ditanya oleh petugas hukum, "pakaianmu seperti apa? Mini, ya?" atau "mungkin senyummu atau jalanmu menggoda pelaku?" serta pertanyaan lain yan bias gender (Dzuhayatin, Pitaloka, dan Abdullah, *Populasi*, 12, 2001: 47).

Jumlah kasus kekerasan seksual yang diproses hukum timpang dengan kenyataan di lapangan. Jarak ini menunjukkan ketidakpercayaan korban kekerasan seksual terhadap institusi hukum. Sementara, secara kualitatif penanganan kasus KTP dinilai kurang layak karena tidak memenuhi tuntutan korban.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Hasil penelitian yang dilakukan Eja Yuarsi (2001) dalam aspek hukum penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan terdapat bias gender. Bias pertama terdapat pada teks hukum yang menempatkan perempuan sebagai korban dan laki-laki sebagai pelaku. Teks hukum ini cenderung merugikan pihak korban. Kedua, prosedur hukum yang ditempuh dan seluruh proses litigatif (hukum acara pidana). Ketiga, sikap aparat hukum yang belum memihak dan mensubordinasikan korban (dalam Dzuhayatin, Pitaloka, dan Abdullah, *Populasi*, 12, 2001: 48).

Komnas Perempuan juga memiliki pandangan yang tidak berbeda. Melalui konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu-Penanganan Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKTP), Komnas Perempuan menyatakan terdapat bias gender dalam hukum di Indonesia. Bias tersebut terdapat dalam tiga bagian (Komnas Perempuan, 2018: 28 – 29).

Pertama, substansi hukum. Substansi hukum merupakan teks hukum yang menjadi acuan penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Teks hukum ini meliputi hukum materil yang mengatur tentang apa yang disebut sebagai kejahatan dan pelanggaran. Hukum materil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang belum mengenal konsep kekerasan berbasis gender. Dalam kitab tersebut tidak ada satupun pasal yang membicarakan kekerasan terhadap perempuan. Kekerasan seksual hanya dikategorikan sebagai kejahatan kesusialaan, bukan kejahatan atas integritas tubuh perempuan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Selain itu, deskripsi perkosaan dalam KUHP juga sempit. Pasal 285 KUHP berbunyi,

"*Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun*" (https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f9bb33933005/delik-aduan/ diakses pada 15 Mei 2020).

Pasal tersebut mendefinisikan perkosaan sebagai hubungan badan. Hal ini mengakibatkan tindak pemaksaan hubungan seksual yang tidak disertai penetrasi tidak masuk kategori perkosaan. Sehingga, banyak kasus perkosaan pada akhirnya tidak memenuhi unsur-unsur yang dituntut oleh pihak kepolisian. Komnas Perempuan mendefiniskan segala bentuk pemaksaan hubungan seksual sebagai kejahatan perkosaan (https://lpmarena.com/2019/07/24/kasus-agni-dalam-kepungan-hukum-bias-gender/ diakses pada 15 Mei 2020).

Simplifikasi ini berdampak pada proses hukum yang mengharuskan perempuan korban perkosaan melakukan *Visum et Repertum* untuk membuktikan bahwa ia telah diperkosa. Penggunaan *Visum et Repertum* ini mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 13 ayat 1, yang menyatakan,

"*Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena perstiwa*

yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya."

Meskipun *Visum et Repertum* bisa membaca bekas luka di vagina hingga 1,5 tahun, terdapat banyak kasus perkosaan yang tidak terjadi penetrasi penis terhadap vagina, sehingga bekas luka sudah tidak bisa dibaca.

Keterangan ahli kedokteran untuk kebutuhan pembuktian dalam proses hukum sebenarnya tidak hanya berkaitan dengan fisik. Penegak hukum juga bisa menggunakan *Visum et Repertum Psikiatrikum* yang merekam jejak psikologis korban. Penggunaan *Visum et Repertum Psikiatrikum* termaktub dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Penegakan Hukum. Dijelaskan, visum jenis ini merupakan keterangan dokter spesialis kedokteran jiwa yang berbentuk surat hasil pemeriksaan kesehatan jiwa pada seseorang di fasilitas pelayanan kesehatan untuk kepentingan penegakan hukum. Namun, korban kerap hanya diarahkan untuk melakukan *Visum et Repertum* yang justru menyulitkan proses pembuktian tindak perkosaan yang menimpanya.

Hal inilah yang membuat pemerhati gender mendesak pemerintah untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pencegahan Kekerasan Seksual (RUU PKS). Rancangan ini bertolak dari deretan kasus kekerasan seksual yang terjadi di masyarakat. Sehingga, deskripsi dan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

aturan tentang tindak kekerasan terhadap perempuan lebih akomodatif dan kontekstual (https://lpmarena.com/2019/07/24/kasus-agni-dalam-kepungan-hukum-bias-gender/ diakses pada 15 Mei 2020).

Kedua, bias gender ditemukan dalam aspek formal hukum. Aspek formal atau biasa disebut hukum formal mengatur penegakan hukum materil. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Hukum formal mengatur proses hukum dari penyelidikan, penyidikan, pemeriksaan di pengadilan, penjatuhan putusan, dan eksekusi. Di antara bias gender tersebut adalah korban hanya terlibat dalam proses sebelum penyidikan. Dalam proses selanjutnya, pelibatan korban tidak diatur secara eksplisit. Dengan kata lain, pelaku lebih memiliki kesempatan untuk berinteraksi dan menjelaskan kepada penegak hukum.

Lebih jauh, pembahasan KUHAP ketika disusun tidak terlepas dari tarik menarik antara ingin mengkomodasi HAM dan otoritarianisme Orde Baru. Dampaknya, terdapat celah mengorbankan hak-hak korban dan kemudian menyandingkan hak korban dengan pelaku. Di sisi lain, kitab ini sangat memusatkan proses pada institusi penegak hukum, memuat materi yang menjustifikasi penyalahgunaan wewenang, multi tafsir yang akhirnya memberikan fleksibilitas penggunaan wewenang, sebagai dampak dari ketidakseimbangan penerjemahan sistem perlindungan individual, publik, dan negara.

Sebagai akibatnya, terjadi ketimpangan perlindungan hak saksi dan korban dibandingkan tersangka, korban versus penegak hukum, dan tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

ada prosedur yang mengakomodir pengalaman dan kepentingan spesifik perempuan yang tidak termuat dalam pasal. Di sisi lain, penegak hukum juga lalai menggunakan kewenangannya untuk menggali data dan informasi yang aktual.

Sebagai kitab hukum acara pidana, KUHAP memiliki posisi yang sentral dalam proses penegakan hukum. Sayangnya, undang-undang ini belum mengenal kekhasan kasus kekerasan terhadap perempuan. Hingga hari ini, KUHAP belum mengakomodasi kepentingan korban kekerasan perempuan sebagaimana direkomendasikan dalam konsep SPPT PKKTP (Komnas Perempuan, 2018: 38 – 42).

Ketiga, kultur hukum. Unsur ini merupakan budaya masyarakat yang patriarkal. Perempuan menjadi warga kelas dua dan kerap distigma negatif. Budaya patriarki berdampak pada respon masyarakat ketika menemui peristiwa kekerasan seksual yang dialami perempuan. Jika kekerasan terjadi dalam keluarga, mereka menganggap masalah tersebut sebagai urusan keluarga. Perempuan korban kekerasan seksual juga kerap disalahkan atas tindak kejahatan yang dialaminya, atau biasa disebut *victim blaming*. Arus mainstream ini turut mempengaruhi cara pandang dan sikap penegak hukum, yang pada akhirnya terwujud dalam bagaimana proses hukum itu dijalankan.

7. Perempuan di Media Massa

Citra perempuan dalam media massa berubah-ubah. Konstruksi ini tidak bisa dilepaskan dari peran negara dalam memposisikan perempuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

berikut perannya di ruang publik. Ketika Orde Lama, perempuan kerapkali digambarkan sebagai sosok yang cerdas dan progressif. Memiliki peran dalam politik dan mandiri.

Berbeda ketika Orde Baru, Soeharto menempatkan perempuan sebagai sosok pendukung suami. Perempuan dikonstruksi sebagai pinggan, peraduan, dan pigura. Pinggan, atau nampan, merupakan penggambaran yang menempatkan perempuan sebagai pelayan. Mereka memiliki tugas melayani suami. Peraduan memiliki makna tempat tidur, menjadikan perempuan sebagai objek seksual. Sementara, pigura, menggambarkan perempuan sebagai hiasan rumah tangga. Dalam sejarah, Orde Baru dicatat sebagai rezim yang membangun konstruksi pengiburumahtanggaan atau konswp ibuisme (*householdwifization*). Perempuan dalam media massa tidak luput dari kontrol ketat yang dilakukan oleh rezim soeharto. Citra perempuan dijaga sebagai ibu rumah tangga, sebagai pigura. Pasca runtuhnya Orde Baru, media massa bermunculan setelah Presiden B.J. Habibie mencabut syarat Surat Ijin Penerbitan Pers (SIUPP). Media-media ini mengusung konten dari politik hingga seks (Junaidi, dalam Rahmawati dan Anwari (), 2013: 137 – 139).

Penelitian yang dilakukan Feminis Barat seperti Betty Friedan dan Germain Greer terhadap konten media pada dekade 60 dan 70 an cenderung menyoroti konten hiburan. Penelitian-penelitian tersebut mengungkapkan media massa cenderung membangun citra perempuan yang stereotipikal: Perempuan adalah sosok yang pasif, tunduk, lemah,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

emosional, objek seksual, dan peran yang paling tepat adalah ibu rumah tangga (dalam Noviani, *Jurnal Perempuan*, Agustus 2013, 18: 63).

Runtuhnya Orde Baru juga berdampak pada munculnya media-media yang mengeksploitasi tubuh perempuan. Eksploitasi tubuh perempuan dalam media tidak hanya terwujud dalam foto-foto vulgar di cover tabloid atau majalah, melainkan banyak ditemukan dalam judul dan isi berita.

Menurut Schaap (2009), dibanding konten hiburan, berita, tentu saja memiliki nilai yang berbeda. Khalayak menganggap berita sebagai konten yang lebih dekat dengan realitas. Kesadaran akan klasifikasi informasi yang berbasis pada fakta membuat mereka menuntut kredibilitas yang tinggi dari informasi yang disajikan. Namun, dalam produksinya, media memilah fakta yang akan dibagikan kepada khalayak. Seleksi ini mengacu pada *news value*. Dengan demikian, terdapat pihak yang menentukan mana informasi yang penting dan tidak.

Rosalind Gill (2007) menegaskan, media perlu dipahami sebagai produk budaya. Ia merepresentasikan asumsi kultural dominan tentang apa dan siapa yang penting. Selain itu adalah posisi dan relasi sosial yang dianggap normal. Sehingga, narasi berita yang mengangkat isu gender juga merepresentasikan konstelasi gender yang diakui dan diyakini secara dominan dalam masyarakat. Melalui berita, dinamika relasi gender dalam kultural masyarakat akan terlihat. Gagasan dominan tentang posisi, peran, dan kehidupan perempuan bisa dibaca dari bagaimana berita menarasikan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perempuan (dalam Noviani, *Jurnal Perempuan*, 18, Agustus 2013: 63 – 65).

Dalam masyarakat yang dikuasai ideologi patriarki, perempuan menjadi alat untuk menggaet perhatian massa. Dalam hal ini, ada dua hal yang secara umum menonjol, yakni wacana ketubuhan dan daya tarik seksualitas serta pengiburumahtanggaan (Kasiyan, 2008: 14). Banyak berita memuat ketimpangan gender. Dalam kasus pidana, dengan perempuan sebagai pelaku atau korban, mereka kerap dilekati stereotip dan disubordinatkan.

8. Kekerasan Seksual dalam Berita

Berita kekerasan seksual juga tidak terlepas dari paradigmaa bias gender. Ideologi patriarki yang dominan dalam masyarakat mempengaruhi produksi wacana yang dilakukan para jurnalis dan institusi media. Keadaan ini berdampak pada tidak adanya kepekaan jurnalis terhadap korban kekerasan seksual yang berujung pada berita-berita yang alih-alih mendukung pemulihan dan pemenuhan hak korban, justru kerap menormalisasi peristiwa perkosaan, bahkan mengeksploitasi korban demi rating atau oplah.

Menurut Santi (2006), pemberitaan yang berkaitan dengan perempuan sebagai objek, kerap menyematkan label yang oposisi biner terhadap kaum ini. Pelabelan tersebut seperti munculnya kategori "perempuan baik-baik" dan "bukan perempuan baik-baik". Hal ini berdampak pada anggapan masyarakat bahwa seksualitas perempuan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merupakan objek komersil dan layak dimaknai sebagai previlege bagi laki-laki. Perempuan korban perkosaan kemudian dilabeli sebagai "perempuan bukan baik-baik" (dalam Susilo, Kawistara, 7, April 2017: 42).

Berita tentang perkosaan terhadap perempuan juga kerap menggunakan pemilihan kata yang maskulin dan tidak berimbang. Perempuan dan tubuhnya merupakan pihak yang salah. Perempuan tidak memiliki kepantasan untuk memperbincangkan tubuhnya sendiri yang dianggap merupakan bagian dari kerangka besar seksualitas, sebagaimana dijelaskan oleh Butler (dalam Susilo, Kawistara, 7, April 2017: 43). Pengamatan Butler mengungkap, dalam perbincangan tentang tubuh dan seksualitas, terdapat ketidakseimbangan penggunaan bahasa yang feminin dan maskulin. Kata-kata feminin kerap diikuti dengan ungkapan seperti, diperkosa, digauli, dicabuli, dibakar, yang menunjukkan seksualitas perempuan bersifat pasif. Berseberangan dengan itu, banyak ditemukan kata-kata maskulin yang diikuti dengan ungkapan-ungkapan tersebut. Penting diperhatikan, kata digauli, diperkosa, dibakar, menunjukkan sifat aktif dari sisi seksualitas laki-laki.

Persoalan lain dalam berita kekerasan seksual terhadap perempuan adalah pelenggaran kode etik jurnalistik yang berkaitan dengan kasus kekerasan seksual, tidak mengedepankan hak, dan bahkan menghakimi korban. Komnas Perempuan melakukan kajian analisis media terhadap 9 media di Indonesia, yang terdiri dari 5 media online dan 4 media cetak. Media tersebut adalah Tempo.co, Print.kompas.com, Kompas.com, Jakarta

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Globe, The Jakarta Post, Pos Kota, Indo Pos, Republika, dan Koran Sindo. Dari 1.238 kliping berita yang dikumpulkan, terdapat 225 berita kekerasan seksual (18,17 %), dengan kekerasan seksual terbanyak berbentuk perkosaan (34 %), pelecehan seksual (22 %), dan perdagangan perempuan untuk tujuan seksual (21 %).

Adapun bentuk pelanggaran yang paling banyak dilakukan media adalah mencampurkan fakta dan opini (40 %), mengungkap identitas korban (38 %), mengandung informasi cabul dan sadis (21%), serta mengungkap identitas pelaku anak (1 %). Media-media ini juga belum menulis untuk pemenuhan hak korban. Dari 9 media, 8 media tercatat masih menyebutkan identitas korban. Pelanggaran lain dalam hal ini adalah menggunakan diksi yang bias (24,21 %), mengungkap identitas korban (23,15 %), stigmatisasi korban sebagai pemicu kekerasan seksual (15,89 %), dan seterusnya. Sementara, data hasil analisis isi berita menyatakan media cenderung menggiring pembacanya untuk membuat stereotype dan menghakimi korban (Komnas Perempuan, 2015).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

9. Paradigma Penelitian Teks Media

Bahasa merupakan aspek sentral dalam semua paradigma penelitian teks media yang menggunakan model analisis wacana. Studi kebahasaan ini beragam, mulai dari sekadar mengoreksi struktur gramatikal, mengungkap makna berdasarkan penafsiran dan motif seorang subjek, hingga menyingkap kepentingan ideologi dan relasi timpang dalam masyarakat.

Perbedaan paradigmaa ini telah dibeberkan oleh A.S. Hikam (dalam Eriyanto, 2008: 4 – 6). Berikut adalah penjelasan ringkasnya.

Terdapat tiga pandangan tentang bahasa dalam model analisis wacana. Pertama, pandangan yang menyatakan bahwa bahasa merupakan jembatan antara manusia dan objek di luar dirinya. Pandangan ini menilai bahasa dapat mewakili realitas atau pengalaman-pengalaman manusia secara utuh tanpa distorsi, dengan catatan bahwa pengalaman tersebut disampaikan dengan menggunakan kaidah sintaksis dan semantik yang benar. Cara pandang ini dianut oleh kaum positivisme-empiris. Kebenaran atau ketidakbenaran suatu wacana menurut paradigmaa ini mengacu pada kaidah sintaksis dan semantik. Adapun yang dituju adalah penggambaran tata aturan kalimat, bahasa, dan pengertian bersama. Paradigmaa ini memiliki konsekuensi bahwa orang tidak perlu mengetahui makna-makna subjektif atau nilai-nilai yang mendasari pernyataannya.

Pandangan kedua adalah konstruktivisme. Padangan ini mengkritik kaum positivis yang memisahkan subjek dengan subjek bahasa serta sebuah pernyataan bersifat objektif. Subjek—yang diabaikan oleh kaum positivis—merupakan sentral dalam kegiatan wacana. Subjek memiliki kemampuan untuk mengontrol wacana yang dilontarkan berikut maksud dan kepentingannya. Bahasa diatur dan dihidupkan oleh pernyataan-pernyataan yang bertujuan. Sehingga, pernyataan seorang subjek merupakan penciptaan makna. Analisis wacana dalam paradigmaa ini mengungkap makna dan maksud dari subjek bahasa. Pengungkapan ini

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

dilakukan, salahsatunya, dengan menempatkan diri pada posisi pembicara dan mengikuti struktur makna yang digunakan olehnya.

Ketiga, pandangan kritis. Pandangan ini mengoreksi kaum kosntruktivis yang mengabaikan proses produksi dan reproduksi makna yang terjadi secara historis ataupun institusional. Pandangan konstrukstivis melewatkan analisis faktor hubungan kekuasaan yang inheren dalam setiap wacana. Hubungan kekuasaan ini penting diperhatikan karena berdampak pada pembentukan subjek dan perilakunya.

Pandangan kritis menekankan perhatiannya pada pertarungan berbagai kekuatan yang terlibat dalam proses produksi dan reproduksi makna. Individu bukanlah subjek yang independen. Ia dipengaruhi oleh kekuatan sosial dalam masyarakat. Sementara, bahasa bukanlah medium yang netral. Bahasa memiliki peran dalam pembentukan subjek tertentu, tema-tema wacana tertentu, berikut strategi di dalamnya. Sehingga, pandangan kritis selalu melihat bahasa terlibat dalam hubungan kekuasaan. Relasi kuasa inilah yang dibongkar oleh pandangan kritis. Pandangan ketiga ini juga disebut sebagai *critical discourse analysis* (CDA).

Sebagaimana paradigma sebelumnya, analisis dalam paradigmaa ini juga menjadikan bahasa sebagai objeknya. Hanya saja, analisis dilakukan tidak berhenti pada struktur kebahasaan saja, sebagaimana berlaku pada linguistik tradisional. Dalam analisis wacana kritis aspek kebahasaan dihubungkan dengan konteks. Konteks yang dimaksud

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

merupakan praktik penggunaan bahasa untuk tujuan tertentu, termasuk kekuasaan.

Fairclough dan Wodak (1997) berpendapat analisis wacana kritis memperhitungkan praktik pemakaian bahasa (praktik wacana), baik dalam penuturan lisan ataupun tulisan, sebagai bentuk praktik sosial. Hal ini menyebabkan adanya hubungan dialektis antara peristiwa diskursif tertentu dengan situasi, institusi, dan struktur sosial yang membentuknya (dalam Eriyanto, 2008: 7).

Paraktik wacana ini dapat memiliki efek idelogi: mereproduksi hubungan kekuasaan yang tidak seimbang dalam masyarakat. Seperti, relasi timpang antar kelas sosial, ketidakadilan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, dan dominasi kelompok mayoritas atas minoritas. Tindakan ini bisa ditemukan dalam bagaimana perbedaan itu direpresentasikan. Wacacna dapat membuat relasi kuasa tersebut diterima sebagai kewajaran. Analisis wacana kritis mengungkap bagaimana pertarungan antar kelas atau kelompok sosial itu terjadi melalui bahasa.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Analisis wacana kritis memiliki sejumlah karakteristik. Eriyanto mengumpulkan karakteristik tersebut dari tulisan A. van Dijk, Fairclough, dan Wodak.

Pertama, tindakan. Sebagai tindakan, wacana dipahami sebagai bentuk interaksi. Artinya, wacana pasti berkatian dengan orang lain. Konsekuensinya adalah wacana memiliki tujuan, entah untuk membujuk,

menyanggah, dan lainnya. Kemudian, wacana dipahami sebagai tindakan sadar dan terkontrol.

Kedua, konteks. Analisis wacana kritis memperhitungkan konteks sebagai bagian yang penting. Hal itu meliputi, latar, situasi, peristiwa, dan kondisi. Sehingga, dipahami wacana diproduksi dan dipahami pada konteks tertentu. Guy Cook menuturkan, analisis wacana memeriksa konteks komunikasi: siapa komunikan dan komunikator, dalam jenis khalayak dan situasi apa, medium apa, perbedaan tipe perkembangan komunikasi, dan hubungan masing-masing pihak.

Lebih jauh, Guy Cook menyebutkan teks, konteks, dan wacana sebagai pusat dari pengertian wacana. Teks merupakan semua bentuk bahasa, bukan hanya barisan kata yang tercetak di kertas, melainkan ekspresi dalam komunikasi, ucapan, gambar, citra, efek suara, dan sebagainya. Konteks merupakan situasi yang berada di luar teks dan menentukan pemakaian bahasa, seperti, situasi ketika suatu pernyataan dilontarkan, tujuan, dan lainnya. sementara wacana dipahami sbeagau teks dan konteks sekaligus. Analisis wacana berupaya menggambarkan teks dan konteks dalam proses komunikasi. Konteks menjadi bagian penting dalam studi bahasa karena bahasa selalu ada dalam konteks. Hal ini mensyaratkan gambaran spesifik dari budaya yang terkait.

Meski demikian, tidak semua konteks dimasukkan dalam analisis wacana. Hanya konteks yang relevan yang dilibatkan. Beberapa yang dinilai berpengaruh adalah partisipan wacana dan latar pihak atau orang

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

yang memproduksi wacana. Hal ini meliputi, pendidikan, jenis kelamin, kelas sosial, etnis, agama, umur, dan lainnya. Selanjutnya, adalah setting sosial. Hal ini meliputi tempat, waktu, serta posisi pembicara dan pendengar.

Ketiga, historis. Salah satu syarat untuk memahami suatu wacana adalah dengan mengetahui konteks historis dari wacana tersebut. Seperti, ketika seorang peneliti mencoba memahami teks yang diproduksi pada masa pra kemerdekaan, maka ia harus mengetahui situasi sosial politik saat itu yang turut mempengaruhi produksi teks tersebut.

Keempat, kekuasaan. Dalam analisis wacana kekuasaan merupakan bagian yang penting diperhatikan. Pandangan kritis melihat setiap wacana yang dilontarkan pembicaranya bukanlah sesuatu yang alamiah atau netral, melainkan sebuah pertarungan kekuasaan. Analisis wacana kritis tidak terbatas pada detil teks atau struktur wacana saja. Kondisi sosial, ekonomi, politik, serta budaya, merupakan bagian tidak terpisahkan dari analisis ini.

Pertarungan wacana merupakan perebutan kekuasaan untuk melakukan kontrol. Kontrol di sini tidak harus berupa fisik, melainkan bisa mental dan psikis. Melalui wacana, suatu kelompok dominan mengendalikan kelompok lainnya agar bertindak sebagaimana mereka inginkan. Kontrol ini bisa kita temui dalam wacana yang memuat kuasa dalam hubungan perusahaan dan pekerja dalam kasus hubungan ketenagakerjaan, kulit hitam terhadap kulit putih, industri perkebunan terhadap petani, atau bagaimana dominasi kaum laki-laki terhadap

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

perempuan. Di masyarakat, kelompok dominanlah yang mengendalikan kotrol ini. menurut van Dijk hal ini terjadi karena mereka lebih memiliki akses, seperti pengetahuan, uang, dan pendidikan. Kontrol ini bisa berupa kendali atas konteks, yakni siapa yang memiliki boleh berbicara, mendefinisikan suatu persoalan atau tidak. Selain itu adalah kontrol atas struktur wacana, yakni bukan saja apa yang boleh ditampilkan atau tidak, melainkan bagaimana wacana itu ditampilkan.

Kelima, ideologi. Analisis wacana kritis menilai praktik wacana merepresentasikan ideologi tertentu. Ideologi diproduksi oleh kelompok dominan untuk mereproduksi dan melegitimasi kekuasaannya. Melalui wacana yang dilontarkan kaum dominan, suatu tatanan atau keadaan dianggap sebagai kewajaran. Ideologi dinyatakan efektif jika telah kelompok yang didominasi memandangnya sebagai kewajaran.

Ideologi, menurut van Dijk, bertujuan untuk mengatur tindakan dan praktik individu atau anggota suatu kelompok. Individu-individu ini akan bersolidaritas dan membentuk kohesi sosial tertentu. Selain itu, ideologi juga bisa membentuk identitas diri kelompok yang membedakannya dari kelompok lain. Dalam analaisis wacana kritis suatu teks atau pernyataan bisa dianalisis sebagai cerminan dari idelogi teretentu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

G. Kerangka Berfikir

Bagan 2 Kerangka Berfikir

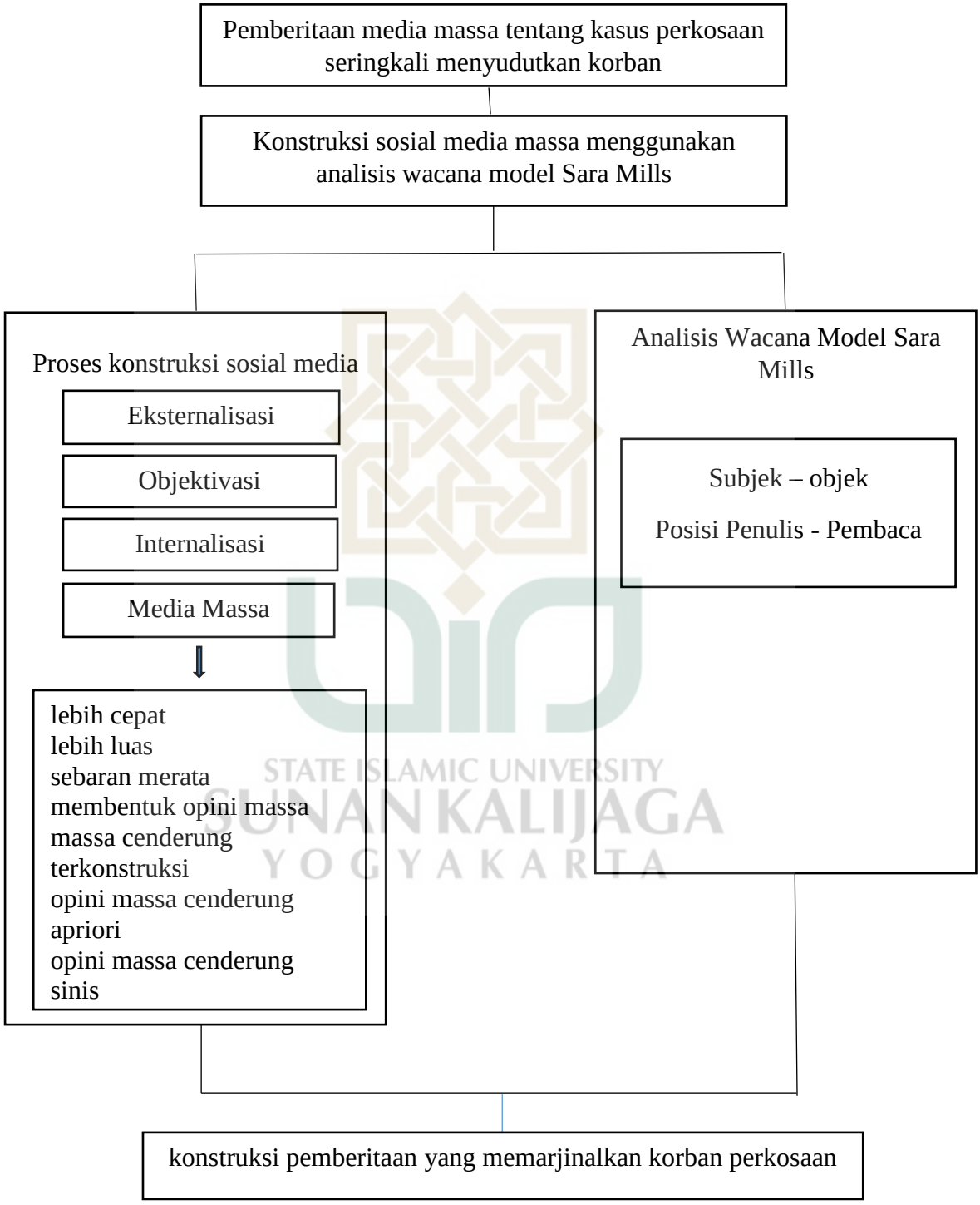

Sumber: Olahan Peneliti

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

H. Metodologi Penelitian

Metode penelitian merupakan alat yang digunakan untuk melakukan penelitian dari pengumpulan data, analisis, hingga penarikan kesimpulan (Jauhari, 2013: 33). Sementara Sugiyono (2010: 3) mengartikan metode penelitian sebagai cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Adapun beberapa hal yang berkaitan dengan metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

1. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan sifat penelitian model deskriptif. Bogdan dan Taylor (1975:5) menjelaskan metode penelitian kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan kata-kata deskriptif berupa tulisan atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati (dalam Lexy, 2010: 30). Metode penelitian kualitatif digunakan untuk mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna. Metode penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi (Sugiyono, 2010: 15).

2. Subjek dan Objek Penelitian

a. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan informan yang dimanfaatkan untuk membantu situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2010: 132). Subjek penelitian ini menggunakan media cetak yang memberitakan proses hukum kasus dugaan perkosaan terhadap Agni sebagai

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

informan. Adapun media cetak yang dipilih adalah harian Kedaulatan Rakyat edisi November 2018 – Februari 2019.

b. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan substansi yang menjadi titik pijak kajian meteri yang akan diteliti menggunakan teori yang berkaitan dalam sebuah penelitian (Moleong, 2010: 132). Adapun objek yang akan diteliti adalah konstruksi pemberitaan proses hukum kasus dugaan perkosaan yang menimpa Agni.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi. Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Bentuknya bisa berupa tulisan, gambar, atau karya seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, ceritera, biografi, peraturan, kebijakan (Sugiyono, 2010: 329).

Peneliti menggunakan berita tentang kekerasan seksual yang menimpa mahasiswi UGM di koran Kedaulatan Rakyat edisi November 2018 hingga Februari 2019 sebagai dokumen yang akan diteliti.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 2 Daftar Berita Tentang Proses Hukum Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswa UGM

No.	Judul berita	Tanggal Terbit
1.	Penyelidikan Dugaan Pemerkosaan Polda Maluku – DIY Lakukan Koordinasi	16 November 2018

2.	Terkait Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi UGM, Polda DIY Minta Keterangan Korban	26 November 2018
3.	Perkosaan Mahasiswi UGM Sudah Masuk Ke Penyidikan	2 Januari 2019
4.	Dugaan Korban Perkosaan Mahasiswi UGM, Korban Tidak Mau Lakukan Visum	12 Januari 2019
5.	Polda Temukan Ketidaksesuaian Fakta di Lapangan	23 Januari 2019
6.	Pelaku Dan Korban Sepakat Damai	6 Februari 2019
7.	Penyidikan Kasus Mahasiswa UGM Dilanjutkan, Muncul Indikasi Tidak Ada Perkosaan	7 Februari 2019

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model Sara Mills. Mills banyak melakukan penelitian analisis wacana. Titik tekan analisis wacana Mills mengenai feminisme. Ia banyak memberikan perhatiannya terhadap bagaimana perempuan ditampilkan dalam teks, baik dalam novel, berita, ataupun video.

Wanita kerap ditampilkan secara bias dalam teks. Mereka dipinggirkan dan digambarkan dengan buruk. Dalam kasus pelecehan

seksual yang menjadikan mereka sebagai korban, perempuan justru kerap kali diposisikan sebagai pihak yang salah. Titik perhatian analisis wacana Mills adalah bagaimana perempuan digambarkan dan dimarjinalkan dalam teks berita. Lain dari itu adalah bagaimana pola dan bentuk marjinalisasi tersebut.

Analisis wacana model Sara Mills berbeda dengan *critical linguistiks* kebanyakan. Perhatiannya tidak dipusatkan pada struktur kebahasaan melainkan bagaimana aktor diposisikan dalam teks: Siapakah yang menjadi subjek dan objek penceritaan. Posisi ini akan mempengaruhi struktur teks dan pemaknaan. Selain aktor, Mills juga memperhatikan bagaimana pembaca dan penulis ditampilkan dalam teks. Posisi ini mempengaruhi bagaimana pembaca ditempatkan dan berdampak pada pemaknaan terhadap suatu teks dan bagaimana aktor sosial ini ditempatkan. Cara penceritaan ini, berikut bagaimana posisi-posisi yang terdapat dalam teks membuat satu pihak menjadi *legitimate* dan pihak lain *illegitimate* (Eriyanto, 2008: 199 – 200).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

a. Posisi Subjek – Objek

Representasi merupakan bagian terpenting dalam analisis wacaana model Sara Mills, sebagaimana model-model lainnya. Bagaimana gagasan, pihak-pihak yang berseteru, kelompok, atau peristiwa direpresentasikan dalam teks akan sangat mempengaruhi pemaknaan khalayak terhadap teks tersebut. Tapi, model Sara Mills berbeda dengan *critical linguistic* yang pada umumnya menekankan pada struktur kebahasaan. Perhatian Mills

ditujukan pada bagaimana posisi aktor, gagasan, atau peristiwa dalam teks. Taruhlah semisal, terjadi perseteruan antara perusahaan perkebunan kelapa sawit dengan petani lahan gambut. Dalam pemberitaan, pihak perusahaan perkebunan memiliki posisi yang lebih tinggi dibanding petani lahan gambut. Pihak perusahaan diposisikan sebai subjek dan petani sebagai objek. Maka, yang kemudian terjadi dalam teks tersebut adalah pihak perusahaan mendefinisikan pihak petani gambut. Pihak perusahaan menjadi subjek yang mendefinisikan masalah sesuai dengan kepentingannya.

Wacana dalam media memang bukan sarana netral. Wacana memiliki kecenderungan menempatkan salah satu pihak sebagai subjek yang dominan atas pihak lainnya. Pada dasarnya, setiap pihak memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi subjek yang mendefinisikan dirinya sendiri dan wartawan memiliki tugas untuk melaporkan pernyataan pihak-pihak tersebut. Namun, yang terjadi tidaklah demikian. Beberapa sebab, seperti akses, latar belakang pendidikan, dan kekuasaan menjadikan pihak-pihak tertentu memiliki kesempatan untuk menjadi subjek sementara yang lain menjadi objek. Semisal, dalam perseteruan perusahaan perkebunan dan petani, pihak perkebunan lebih memiliki akses. Mereka bisa dengan mudah menggelar konferensi pers dan menjelaskan persoalan kepada wartawan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami karena latar belakang pendidikan yang tidak timpang. Sementara, tidak semua kelompok tani memiliki pengetahuan dan kemampuan untuk mengadakan

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

konferensi pers dan tidak mudah menjelaskan persoalannya kepada wartawan yang memiliki latar pengetahuan berbeda. Akibat ketimpangan akses ini adalah munculnya pihak tertentu yang menjadi subjek cerita. Subjek ini mendefinisikan dirinya, permasalahan, dan mendefinisikan pihak lain yang berseteru dengannya.

Dalam kasus perkosaan, wartawan merekonstruksi peristiwa yang belum tentu ia saksikan. Ia menemui pihak pelaku, kepolisian, dan korban. Konsepsi Sara Mills mendorong kita untuk mengkritisi bagaimana aktor-aktor tersebut diposisikan. Misal, pihak laki-laki yang menjadi pelaku diposisikan sebagai subjek dan perempuan korban perkosaan menjadi objek penceritaan. Maka, pihak laki-laki ini akan mendefinisikan persoalan sesuai dengan kepentingannya. Lebih dari itu, bahkan ia mendefinisikan bagaimana perempuan yang menjadi korbannya. Pada umumnya, dalam wacana feminis diyakini perempuan korban perkosaan menjadi objek representasi. Analisis terhadap posisi-posisi dalam pemberitaan secara luas akan mengungkap bagaimana ideologi dan kepercayaan dominan bekerja dalam teks.

Posisi subjek atau objek dalam representasi memiliki muatan ideologis. Dalam kasus di atas yang menjadikan perempuan sebagai objek penceritaan, posisi ini memarjinalkan perempuan. Pertama, adalah sudut pandang penceritaan berada pada pihak laki-laki. Khalayak bergantung pada cerita yang disampaikan laki-laki. Kedua, sebagai subjek representasi, pihak laki-laki tidak saja memiliki keleluasaan pencerita. Ia

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

juga menafsirkan tindakan yang membangun cerita. Ketiga, pendefinisian yang bersifat subjektif tersebut pada akhirnya tidak hanya mendefinisikan dirinya dan peristiwa. Hal yang sulit dihindari adalah pada akhirnya pihak laki-laki sebagai pelaku mendefinisikan pihak korban sesuai dengan kepentingannya (Eriyanto, 2008: 200 – 202).

b. Posisi Pembaca

Pembaca memiliki peran yang penting dalam penciptaan suatu teks, menurut model yang ditawarkan Mills. Ia menolak pandangan banyak ahli yang menempatkan konteks hanya dari penulis. Dalam model-model tersebut pembaca dianggap tidak memiliki peran dalam produksi teks. Bagi Mills, suatu teks merupakan hasil dari negosiasi antara penulis dan pembaca.

Mills berpendapat, bangunan model analisis yang menghubungkan teks dan penulis di satu pihak serta teks dan pembaca di pihak lainnya memiliki sejumlah kelebihan. Pertama, model ini bisa melihat teks secara lebih komprehensif, tidak hanya perkara produksi tapi juga resepsi. Kedua, pembaca menjadi bagian yang penting karena secara langsung atau tidak, sebenarnya sebuah tulisan berkomunikasi dengan khalayak. Hal ini bisa terlihat dari penggunaan kata sapaan atau kata ganti seperti Anda atau kami. Di sini, pembaca tidak hanya diakui keberadaannya, mereka juga merupakan bagian integral dari keseluruhan teks. Sebab, dalam produksinya, seorang penulis memperhitungkan keberadaan pembaca.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Keberadaan tersebut diperhitungkan bisa untuk menarik dukungan, simpati, menekankan, atau meyakinkan (Eriyanto, 2008: 204).

Bangunan teori tentang posisi pembaca Sara Mills berpijak pada teori ideologi Louis Althusser yang mengkombinasikan teori Marxis dan psikoanalisis. Mills menggunakan dua gagasan Althusser. Pertama, interpelasi. Interpelasi mengungkapkan bahwa setiap ideologi membuat kita terpanggil dalam status tertentu sebagai suatu subjek. Semua ideologi memanggil atau menginterpelasi individu konkret sebagai subjek konkret dengan memfungsikan kategori subjek (Althusser, 2015: 54). Konsep interpelasi berkaitan dengan reproduksi kondisi-kondisi produksi dalam masyarakat, seperti membuat seorang subjek menerima keadaan yang telah mapan, menerima peran, dan akhirnya turut menyokong kemapanan tersebut.

Althusser memiliki proposisi individu-individu selalu sudah menjadi subjek. Mereka disadarkan akan posisinya dalam masyarakat, bahwa mereka menjadi subjek yang bebas (dirinya sendiri) dan subjek dari suatu ideologi, seperti, agama, hukum, atau negara. Subjek dan pengakuan akan posisi ini dihubungkan secara imajiner dengan kondisi dari hubungan subjek dengan keseluruhan produksi makna dalam masyarakat.

Ideologi menginterpelasi subjek dan menempatkannya dalam posisi tertentu di suatu tatanan sosial. Hal ini dapat terlihat seperti dalam peristiwa seorang polisi yang menghentikan pengendara mobil. Kemudian pengendara tersebut berhenti. Dalam proses ini, pengendara tersebut tidak

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

saja mengakui sebagai subjek atas dirinya sendiri, tetapi juga subjek yang memiliki relasi dengan kekuasaan, bahwa polisi tersebut berkuasa atas dirinya sebagai pengendara. Interpelasi mengkosntruksi seorang subjek dalam posisinya di masyarakat dan bagaimana seharusnya ia bertindak (Eriyanto, 2008: 207).

Contoh lain yang diajukan Althusser adalah interpelasi subjek dalam ideologi agama. Ia mencontohkan bagaimana pembicaraan Tuhan (Yahweh) dengan Musa. Setelah Tuhan menyatakan identitasnya, Ia menginterpelasi Musa, individu yang diinterpelasi menjadi subjeknya. Dan Musa yang diinterpelasi dengan namaNya, setelah benar-benar mengenali bahwa ia yang dipanggil, mengenali bahwa ia dalah subjek, subjek dari Tuhan, subjek yang ditundukkan mejadi subjeknya Tuhan, *seorang subjek yang ditundukkan melalui Subjek, dan ditundukkan menjadi subjeknya Subjek.* Hal ini dengan bukti bahwa ia mematuhiNya dan membuat pengikutnya menaati perintah Tuhan (Althusser, 2015: 59).

Individu yang terinterpelasi ini merupakan subjek dalam aparatus ideologi negara (*ideological state apparatuses/ISA).* ISA merupakan perwujudan institusi dari sebuah ideologi atau sifat material ideologi (Althusser, 2015: 47). ISA antara lain, agama, hukum, pendidikan, keluarga, politik, serikat buruh, komunikasi (seperti pers, radio, televisi dst), dan budaya (Althusser, 2008: 24).

Interpelasi sendiri, menurut John Fiske, merupakan konsep yang selalu digunakan dalam praktik-praktik komunikasi. Penyapaan seseorang

sejatinya menempatkan orang tersebut dalam posisi dan hubungan sosial tertentu. Dalam komunikasi tersebut, kita berpartisipasi dalam lingkungan sosial secara ideologis dan konstruktif. Bagi Fiske, semua tindakan komunikasi menempatkan seorang individu dalam subjek tertentu. Ketika seseorang berbicara dengan perempuan misalnya, orang tersebut menempatkannya sebagai subjek gender. Contoh lain adalah ketika kita berbicara dengan seorang ulama yang kita hormati. Jalinan komunikasi ini selalu menggunakan kekuasaan yang dimiliki oleh kedua pihak, sehingga selalu mencerminkan relasi kuasa (Eriyanto, 2008: 101).

Gagasan kedua yang digunakan Mills adalah kesadaran. Bagian ini berkaitan dengan penerimaan subjek atas posisi-posisinya sebagai kesadaran. Meski penting dicatat, kesadaran subjek bukanlah kesadarannya sendiri karena merupakan bentukan ISA. Ideologi turut memberikan identitas kepada subjek. Hal ini seperti teori psikoanalisis Jacques Lacan, di mana pada fase cermin seorang bayi memperoleh kesadaran eksistensi sekaligus identitasnya melalui citra cermin atau persepsi di cermin. Sebab identifikasi ini berasal dari luar dirinya, maka sang bayi senantiasa mengalami alienasi (https://indoprogress.com/2016/10/retorika-sapaan-louis-althusser/ diakses pada 13 Juni 2020).

Gagasan Althusser ini menginspirasi banyak analisis teks, terutama tentang bagaimana penulis memposisikan pembaca. Umumnya, tindakan ini terwujud melalui penggunaan sapaan kata ganti orang pertama seperti,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Kamu, Kita, yang ditujukan kepada pembaca. Althusser dalam bukunya dengan terang menyatakan, “baik ia yang menulis baris-baris ini dan pembaca yang membacanya, keduanya adalah subjek, dan dengan demikian, subjek yang ideologis, yaitu bahwa pengarang dan pembaca baris-baris ini keduanya hidup secara spontan dan alamiah dalam ideologi (Althusser, 2015: 51).

Namun, Mills menilai model Althusser menyimplifikasi bagaimana interpelasi bekerja dalam teks. Menurut Mills, interpelasi dalam teks umumnya kerap bekerja melalui penyapaan tidak langsung (*indirect address)* disbanding penyapaan langsung (*direct address*). Penyapaan tidak langsung ini bekerja melalui dua cara. Pertama, mediasi. Pada umumnya, teks membawa tingkatan wacana yang menempatkan kebenaran secara hierarkis. Pembaca akan mensejajarkan atau mengidentifikasi dirinya dengan karakter atau apa yang terdapat di dalam teks. Dalam suatu cerita yang mengusung karakter baik dan jahat berikut plotnya, pembaca akan mengidentifikasi dan menempatkan dirinya dengan tokoh yang baik, atau taruhlah tokoh utama.

Kedua, adalah kode budaya yang diperkenalkan oleh Roland Barthes. Kdoe budaya merujuk pada nilai budaya yang digunakan oleh pembaca dalam menafsirkan suatu teks. Wujud kode budaya ini seperti pernyataan “sebagaimana kita ketahui” atau “kenyataannya” yang mensugestikan sejumlah informasi yang menjadi kepercayaan dan kebenaran bersama. Kode budaya ini membantu pembaca dalam

mendapatkan posisi, terutama berkaitan dengan orientasi nilai yang dianut oleh pembaca (Eriyanto, 2008: 207 – 208).

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Tabel 3 Kerangka Analisis Wacana Kritis Model Sara Mills

Tingkat	Yang ingin dilihat
Posisi subjek – objek	Bagaimana peristiwa dilihat, dari kaca mata siapa peristiwa tersebut dilihat. Siapa yang diposisikan sebagai subjek yang menceritakan dan siapa yang diposisikan sebagai objek yang diceritakan. Apakah masing-masing aktor memiliki kesempatan yang sama untuk menampilkan diri, gagasan, dan kehadirannya sendiri atau ditampilkan oleh orang atau kelompok lain.
Posisi	Bagaimana posisi pembaca ditampilkan penulis dalam teks. Bagaimana pembaca memposisikan dirinya dalam teks. Kepada kelompok manakah pembaca mengidentifikasi dirinya.

Sumber: Eriyanto, Analisis Wacana.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Bertolak pada hasil penelitian terhadap tujuh berita harian Kedaulatan Rakyat tentang proses hukum dugaan kasus perkosaan terhadap Agni, yang terbit sejak 16 November 2018 hingga 7 Februari 2019 dengan menggunakan pendekatan konstruksi sosial media massa dan model analisis wacana Sara Mills, peneliti akan memaparkan beberapa kesimpulan.

Melalui tujuh beritanya, Kedaulatan Rakyat secara terus menerus membangun konstruksi bahwa korban tidak bisa dipercaya. Konstruksi ini dilakukan setahap demi setahap, mulai dari narasi ketidakpercayaan bahwa "kabar perkosaan itu kan baru katanya". Konstruksi ketidakpercayaan dilanjutkan dengan menyudutkan sikap-sikap korban, seperti keputusan tidak mau melapor dan menolak visum. Kemudian, setwlah polisi melakukan olah TKP korban mulai dikonstruksikan sebagai orang yang tidak bisa dipercaya. Akhirnya, pada berita terakhir, korban dikosntruksi telah berbohong, bahwa perkosaan itu tidak terjadi. Dengan kata lain, Kedaulatan Rakyat membangun konstruksi wacana bahwa Balairung telah menyebarkan berita hoaks dan informasi tentang Agni yang merupakan korban perkosaan ketika menjalani program KKN di Pulau Seram, Maluku pada 2017 silam adalah bohong belaka.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Konstruksi tersebut Kedaulatan Rakyat bangun dengan cara menempatkan polisi sebagai subjek cerita, kecuali satu berita pada 6 Februari 2019 karena yang menjadi subjek adalah pejabat UGM. Sepanjang pemberitaan tersebut, korban tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk menjelaskan masalah dari sudut pandangnya. Ia hanya menjadi objek yang terus menerus didefinisikan oleh polisi dan kemudian pejabat kampusnya.

Dengan demikian, Kedaulatan Rakyat secara konsisten menempatkan korban dalam posisi marjinal dan mengkonstruksi kasus perkosaan ini dalam ideologi patriarki. Tindakan Kedaulatan Rakyat menegasikan wacana perkosaan terhadap Agni yang dibangun oleh Balairung berkerja dalam fungsi membersihkan "nama baik" UGM dari persoalan kasus perkosaan.

B. Saran

Setelah meneliti tujuh berita harian Kedaulatan Rakyat tentang proses hukum kasus dugaan perkosaan terhadap Agni, peneliti mengajukan sejumlah saran sebagai berikut,

1. Saran untuk Media

Pemberitaan mengenai perempuan korban perkosaan justru kerap menyudutkan korban. Hal ini bisa muncul karena banyak hal. Pertama, budaya masyarakat yang masih patriarki sehingga tidak memperlakukan perempuan korban perkosaan dengan bena. Kedua, unsur-unsur hukum di Indonesia masih bias gender. Hal tersebut

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

meliputi unsur substansi (undang-undang), unsur struktur hukum (penegak hukum), dan budaya hukum.

Keadaan masyarakat yang dinaungi ideologi patriarki tersebut juga berdampak pada kerja-kerja media. Alih-alih berusaha mematahkan dominasi ideologi patriarki dan membuat ruang yang aman bagi semua pihak, media justru kerap mereproduksi dominasi tersebut. Hal ini terjadi karena wartawan dan awak keredaksian tidak memiliki pemahaman tentang gender. Mematahkan dominasi ideologi patriarki berarti bertentangan dengan kehendak umum masyarakat. Tentu tidak akan menjadi hal yang mudah. Namun, sebagai subjek konstruksi wacana, media memiliki tugas untuk memberikan edukasi kepada publik serta membela suara kaum tertindas. Hal tersebut dapat dilakukan dengan memproduksi wacana tentang keadilan gender dan memenuhi Kode Etik Jurnalistik, terutama *cover bothside*.

Media juga harus melaksanakan disiplin verifikasi, tidak menerima begitu saja informasi yang ia dapatkan dari narasumber. Verifikasi merupakan jantung jurnalisme, sebuah elemen yang membedakannya dari kabar burung, desas desus, atau gosip. Selain itu, wartawan dan media harus memiliki independensi. Hal ini tidak berarti media tidak berpihak. Independensi adalah berpihak terhadap apa yang dinilai benar berdasarkan fakta dan data yang wartawan temukan dari reportase yang jernih, netral, dan telah melakukan verifikasi. Sehingga, kedekatan dengan narasumber harus dijaga agar tidak mempengaruhi

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

independensi wartawan. Dalam kasus penelitian ini, salah satu yang harus diperhatikan adalah kedekatan dengan narasumber dari kepolisian.

2. Saran untuk Pembaca

Di era informasi pembaca harus memiliki dan meningkatkan pengetahuan literasinya. Pengetahuan ini juga sangat berguna dan penting ketika menghadapi informasi dari media konvensional. Pembaca harus belajar memahami bahwa media bukanlah agen yang netral. Ia merupakan agen konstruksi sosial yang memiliki kepentingan. Media kerap merepresentasikan kepentingan dominan yang justru merugikan publik.

3. Saran untuk Peneltian Selanjutnya

Wacana keadilan gender harus terus disuarakan. Sebab, pada kenyataannya hinga hari ini tatanan masyarakat masih didominasi ideologi patriarki. Di bawah ideologi ini, bukan saja perempuan yang kerap ditindas dan tidak mendapatkan keadilan. Tidak sedikit laki-laki menjadi korban ketimpangan kuasa ini. Jika kita masih percaya bahwa keadaan masyarakat bisa diubah, maka salah satu jalannya adalah dengan melalui produksi pengetahuan. Melakukan penelitian tentang ketimpangan gender menjadi bentuk konkrit perjuangan ini.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Daftar Pustaka

Buku

Althusser, Louis. 2015. *Ideologi dan Aparatus Ideologi Negara.* Jakarta: Indoprogress.

Bungin, Burhan. 2015. *Konstruksi Sosial Media Massa*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Eriyanto. 2008. *Analisis Wacana.* Yogyakarta: LKiS.

Fakih, Mansour. 2013. *Analisis Gender & Transformasi Sosial.* Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Ishwara, Luwi. 2000. *Catatan-Catatan Jurnalisme Dasar*. Jakarta: PT. Kompas Media Nusantara.

Jauhari, Heri. 2013. *Panduan Penulisan Skripsi Teori dan Aplikasi.* Bandung: CV. Pustaka Setia.

Junaidi, Ahmad. 2013. "Meliput Isu-isu Perempuan dan LGBT." Edited by Evi Rahmawati and Tantowi Anwari. *Jurnalisme Keberagaman Sebuah Panduan Peliputan* (Sejuk Press) 135 - 146.

Komnas Perempuan (2018). *Membangun akses ke keadilan bagi Perempuan korban kekerasan: Perkembangan Konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu Penanganan Kasus Kekerasan terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP).* Jakarta: Komnas Perempuan.

Lexy, J. 1997. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT remaja Rosda Karya.

Luckmann, Peter L. Berger and Thomas. 1990. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan.* Jakarta: LP3ES.

Moloeng. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif.* Bandung: PT Remaja Rosda Karya.

Rosentiel, Bill Kovach & Tom. 2004. *Elemen-Elemen Jurnalisme.* Jakarta: ISAI.

Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan.* Bandung: Penerbit Alfabeta.

Sumaidiria, AS Haris. 2006. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature.* Bandung: Simbiosa Rekatama Media.

Jurnal

Noviani, Ratna. 2013. "Teknologi Filmik dalam Berita TV dan Konstruksi Monstrous Feminine." *Jurnal Perempuan* 59 - 76.

Setiawan, Yulianto Budi. 2011. "Analisis Wacana Kritis Pemberitaan Kekerasan Berbasis Gender di Surat Kabar Harian Suara Merdeka." *Jurnal Komunikasi Makna* 13 - 20.

Siti Ruhaini Dzuhayatin, Irwan Abdullah, dan Dyah Pitaloka. 2001. "Bias Gender dalam Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Secara Litigatif." *Populasi* 45 - 74.

Suhra, Sarifa. 2013. "Kesetaraan Gender dalam Al Qur'an dan Implikasinya Terhadap Hukum Islam." *Jurnal Al Ulum* 373 - 394.

Skripsi

Asyhari, Rifai, *Analisis Wacana Pemberitaan Kasus Penganiayaan Anak oleh Ibu Tiri dalam Koran Jawa Pos.* Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2019.

Nursyamsi, Aisyah, *Analisis Wacana Si Barbie Masih Sendiri pada Laporan Utama di Majalah Tempo.* Skripsi: Fakultas Dakwah dan Komunikasi, UIN Syarif Hidyatulloh, Jakarta, 2019.

Dokumen

Company Profile Kedaualtan Rakyat (2020).

Komnas Perempuan (2015). "Sejauh Mana Media Telah Memiliki Perspektif Korban Kekerasan seksual," analisa media, Jakarta.

Komnas Perempuan (2017). "Kenali dan Tangani 15 Bentuk Kekerasan Seksual," booklet, Jakarta.

Wawancara

Alimatul Qibthiyah. 2020. "Analisis Wacana Sara Mills". *Hasil Wawancara Pribadi*: 20 Oktober 2020, Yogyakarta.

Surat Kabar

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

"Kasus Perkosaan Mahasiswi Gubernur DIY Minta Segera Dituntaskan", *Kedaulatan Rakyat* (Kamis, 15 November 2018), hlm. 1.

"Penyelidikan Dugaan Pemerkosaan Polda DIY-Maluku Lakukan Koordinasi", *Kedaulatan Rakyat* (Jumat, 16 November 2018), hlm. 1.

"Terkait Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi UGM Polda DIY Minta Keterangan Korban", *Kedaulatan Rakyat* (Jum'at, 23 November 2018), hlm 12.

"Sanksi Menunggu Rekomendasi Tim Etik UGM Simpulkan Terjadi Pelecehan Seksual", *Kedaulatan Rakyat* (Sabtu, 8 Desember 2018), hlm. 12.

"Perkosaan Mahasiswi UGM Sudah Masuk ke Penyidikan", *Kedaulatan Rakyat* (Rabu, 2 Januari 2019), hlm. 8.

"Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM Korban Tidak Mau Lakukan Visum", *Kedaulatan Rakyat* (Sabtu, 12 Januari 2019), hlm. 8.

"Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM Polda Temukan Ketidaksesuaian Fakta di Lapangan", *Kedaulatan Rakyat* (Rabu, 23 Januari 2019), hlm. 12.

"Kasus Perkosaan Mahasiswi UGM Pelaku dan Penyintas Sepakat Damai", *Kedaulatan Rakyat* (Rabu, 6 Februari 2019), hlm. 12.

"Muncul Indikasi Tidak Adaperkosaan Penyidikan Kasus Mahasiswa UGM Dilanjutkan", *Kedaulatan Rakyat* (Kamis, 7 Februari 2019), hlm. 12.

Internet

https://tirto.id/mengapa-dosen-pelaku-pelecehan-seksual-susah-dipecat-djvJ, diakses pada 5 Agustus 2020.

www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4f9bb33933005/delik-aduan/, diakses pada 15 Mei 2020.

https://www.vice.com/id_id/article/3kgkmv/perjuangan-panjang-agni-mencari-keadilan-belum-berakhir-damai-seperti-diklaim-ugm, diakses pada 9 Agustus 2020.

www.balairungpress.com/2018/11/nalar-pincang-ugm-atas-kasus-perkosaan/, diakses pada 23 April 2020.

https://lpmarena.com/2019/07/24/kasus-agni-dalam-kepungan-hukum-bias-gender, diakses pada 20 Mei 2020.

https://dewanpers.or.id/kebijakan/peraturan /, diakses pada 24 Juli 2020.

https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/bpcbyogyakarta/kedaulatan-rakyat-dalam-lintasan-sejarah, diakses pada 22 Juli 2020.

https://tirto.id/kasus-agni-dan-panggilan-janggal-polisi-kepada-penulis-balairung-ddDl.

https://tirto.id/kedaulatan-rakyat-koran-pertama-setelah-ri-merdeka-dan-masih-eksis-eiNe, diakses pada 7 Agustus 2020.

https://pers.droneemprit.id/agni-dan-rapor-merah-untuk-ugm/, diakses pada 7 Agustus 2020.

https://pers.droneemprit.id/agni-dan-rapor-merah-untuk-ugm/, diakses pada 23 April 2020.

https://tirto.id/testimoni-kekerasan-seksual-174korban79-kampus-29-kota-dmTW, diakses pada 23 April 2020.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN

Lampiran 1: Daftar Pemberitaan Kedaulatan Rakyat Tentang Proses Hukum Kasus Perkosaan Terhadap Agni Periode November 2018 – Februari 2019.

No	Tanggal	Judul	Halaman
1.	16/11/2018	Penyelidikan Dugaan Pemerkosaan Polda DIY-Maluku Lakukan Koordinasi	HLM 1
2.	23/11/2018	Terkait Dugaan Pemerkosaan Mahasiswi UGM Polda DIY Minta Keterangan Korban	HLM 12
3.	2/1/2019	Perkosaan Mahasiswi UGM Sudah Masuk ke Penyidikan	HLM 8
4.	12/1/2019	Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM Korban Tidak Mau Lakukan Visum	HLM 8
5.	23/1/2019	Kasus Dugaan Perkosaan Mahasiswi UGM Polda Temukan Ketidaksesuaian Fakta di Lapangan	HLM 12
6.	6/2/2019	Kasus Perkosaan Mahasiswi UGM Pelaku dan Penyintas Sepakat Damai	HLM 12
7.	7/2/2019	Muncul Indikasi Tidak Adaperkosaan Penyidikan Kasus Mahasiswa UGM Dilanjutkan	HLM 12

THE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 16 November 2018

PENYELIDIKAN DUGAAN PEMERKOSAAN

Polda DIY-Maluku Lakukan Koordinasi

YOGYA (KR)- Polisi sudah melakukan penyelidikan untuk mencari kebenaran dugaan pemerkosaan terhadap mahasiswi UGM saat KKN di Maluku tahun 2017. Dalam penyelidikan itu, Polda DIY telah berkoordinasi dengan UGM dan Polda Maluku.

Kapolda DIY Brigjen Pol Ahmad Dofiri mengungkapkan, petugas telah berkoordinasi dengan UGM untuk melakukan investigasi dan penyelidikan. Meskipun saat ini, korban juga belum melaporkan kasus tersebut ke polisi.

KR-Mahar Prastiwi

Brigjen Pol Ahmad Dofiri

"Petugas sudah meminta keterangan ke pihak-pihak yang mengetahui informasi dugaan pemerkosaan. Bahkan kami juga telah berkoordinasi dengan Polda Maluku karena kejadian itu di wilayah hukum Polda Maluku," kata Kapolda DIY usai memimpin apel pemberian penghargaan kepada Kapolresta Yogya, Kamis (15/11).

Diterangkan Brigjen Ahmad Dofiri, penyelidikan itu untuk memastikan apakah kejadian pemerkosaan benar terjadi atau tidak. Jangan sampai, korban mengalami kejadian dua kali yaitu korban pemerkosaan dan korban dibully. "Kabar pemerkosaan itu, *kan* baru katanya. Makanya kami melakukan penyelidikan apakah informasi itu benar terjadi atau tidak," terangnya.

Jika memang sudah ada saksi terkait dugaan pemerkosaan, Kapolda DIY memastikan tidak sulit untuk mengungkap pelakunya. "Kalau ada saksi, tidak sulit menangkap pelaku," tegasnya.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto menambahkan, proses penyelidikan telah dilakukan kepolisian sejak kasus tersebut ramai diperbincangkan. Dengan langkah ini, bukan berarti polisi bisa langsung menerapkan pidana, mengingat, laporan informasi hanya berdasarkan pemberitaan media dan informasi di sosial media.

"Upaya kepolisian sebatas penyelidikan, tidak sampai penyidikan. Metodenya berupa laporan informasi yang disusun menjadi laporan hasil penyelidikan atau LHP. Hal ini bukan laporan polisi, tapi dasarnya laporan informasi," urainya. **(Sni/R-2)-f**

Lampiran 3: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 23 November 2018

TERKAIT DUGAAN PEMERKOSAAN MAHASISWI UGM

Polda DIY Minta Keterangan Korban

YOGYA (KR)- Polda DIY telah meminta keterangan penyintas atau korban kekerasan seksual dan orang yang diduga pelaku. Selain itu juga meminta keterangan 8 orang yang mengetahui informasi terkait kasus yang menimpa mahasiswi UGM saat KKN di Maluku tahun 2017 silam.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Yulianto menjelaskan, minggu kemarin polisi telah memintai keterangan korban (Agni, nama samaran) dan orang yang diduga sebagai pelaku.

"Hasil dari keterangan penyintas, orang yang diduga dan orang yang mengetahui informasi itu akan kami jadikan bahan untuk gelar perkara. Setelah itu polisi baru akan mengambil langkah selanjutnya," kata Yulianto, Kamis (22/11).

Sampai saat ini, polisi belum bisa memastikan apakah benar adanya pemerkosaan atau tidak. Bahkan sampai saat ini, belum ada laporan polisi (LP) baik di Polda DIY maupun Polda Maluku.

"Kami sudah koordinasi dengan Polda Maluku dan sampai sekarang tidak ada LP. Makanya masih kami gali terus itu, apakah informasi pemerkosaan benar terjadi atau tidak," ucapnya.

Terpisah, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Dr Hadi Utomo SH MH mengatakan, setelah menerima surat pengaduan dari UGM, baik Polda DIY dan Polda Maluku sama-sama melakukan penyelidikan. Dari penyelidikan tersebut, pihaknya telah meminta keterangan kepada lebih dari 8 orang. "Dalam waktu dekat, kami lakukan gelar perkara apakah bisa meningkat ke penyidikan," ungkap Kombes Pol Hadi.

Sedangkan Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan DIY mendatangi Fisipol UGM guna mengumpulkan data, informasi dan dokumen terkait kasus tersebut. Data, informasi dan dokumen tersebut akan dianalisis lebih lanjut oleh ORI DIY, kemudian akan diberikan kesimpulan dan rekomendasi yang komprehensif dan objektif terkait kasus tersebut.

"Ini masih tahap awal pengumpulan data," kata Koordinator Bidang Penyelesaian Laporan ORI DIY, Nugroho Andrianto usai bertemu Dekan Fisipol UGM Dr Erwan Agus Purwanto di Ruang Dekanat Fisipol UGM Yogyakarta, Rabu (21/11).

Pihaknya juga akan menelusuri dugaan maladministrasi yang dilakukan UGM dalam menyelesaikan kasus ini, yang menyebabkan penyelesaian kasus tidak cepat atau penundaan berlarut. Setelah Fisipol, ORI DIY juga akan mengagendakan hal yang sama untuk Fakultas Teknik UGM dan tim investigasi yang dibentuk Rektor UGM. Namun Nugroho enggan menyebutkan detail informasi penting yang diperoleh dari Dekan Fisipol UGM.

(Sni/R-2/Dev)-o

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 4: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 2 Januari 2019

PERKOSAAN MAHASISWI UGM

Sudah Masuk ke Penyidikan

SLEMAN (KR) - Kasus perkosaan mahasiswi UGM, mulai memasuki tahap penyidikan. Setelah sekian lama, akhirnya ada pihak yang melaporkan kepada Polda DIY. Pelapor adalah Arif Nurcahyo, Kepala Satuan Keamanan dan Keselamatan (SKK) UGM. Polda mengimbau agar masyarakat tidak mengaburkan kasus yang masih bergulir ini, seperti penghentian penyidikan atau SP3 maupun penggunaan inisial Agni untuk korban perkosaan tersebut.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo mengatakan, kasus perkosaan yang ramai diperbincangkan itu, 10 Desember lalu, sudah naik ke tahap penyidikan. Bahkan, sudah 19 orang saksi yang diperiksa. Termasuk korban dan terduga pelaku.

Naiknya kasus ini ke penyidikan, jelas Hadi, sudah sesuai prosedur hukum. Seluruh saksi telah dimintai keterangan secara terperinci dan mengumpulkan bukti. "Kami juga sudah berkoordinasi dengan Polda Maluku. Naiknya kasus ini ke tahap penyidikan atas pengaduan dari UGM yang ditandatangani Rektor UGM," jelas Kombes Pol Hadi, Senin (31/12) lalu.

Hadi memastikan UGM selama ini kooperatif, namun justru keengganan muncul dari pihak korban. Bahkan saat dihubungi penyidik, korban tetap tak mau membuat laporan. Namun, pihaknya tidak ingin terlalu memaksakan korban untuk melapor. Meski imbasnya, pemeriksaan polisi menjadi berjalan di tempat. Namun akhirnya ada pelapor Arif Nurcahyo, sehingga bisa ditingkatkan menjadi penyidikan.

Kombes Pol Hadi meluruskan sejumlah isu yang beredar selama kasus perkosaan mahasiswi UGM ini ditangani, yakni kabar penghentian penyidikan atau SP3.

Proses penyidikan ini akan terus berlanjut. Terbukti, dari terpenuhinya unsur kejadian, korban, bukti dan pemeriksaan sejumlah saksi. "Kami minta penggunaan nama inisial Agni dihentikan karena merupakan pengaburan fakta kejadian. Meski tujuannya untuk melindungi korban, tapi justru menggiring opini," kata Hadi, seraya menyebutkan, inisial asli korban adalah AL bukan Agni. (R-2)-d

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 5: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 12 Januari 2019

DUGAAN PERKOSAAN MAHASISWI UGM

Korban Tidak Mau Lakukan Visum

SLEMAN (KR) - Penyidik Polda DIY berkomitmen menyelesaikan kasus dugaan pemerkosaan dan pencabulan yang menimpa mahasiswi UGM, AL secara gamblang. Pekan depan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY juga akan memimpin olah tempat kejadian perkara (TKP) di Maluku. Penyidik tak menampik, pengungkapan kasus ini menghadapi kesulitan, termasuk pihak korban yang tidak mau melakukan visum.

Kabid Humas Polda DIY AKBP Yuliyanto menerangkan, terlapor DK ada pemeriksaan tambahan. Namun, yang bersangkutan belum berani menyampaikan langsung di hadapan media. Hingga saat ini, penyidik sudah memeriksa 20 saksi. Seharusnya, Jumat kemarin dijadwalkan ada tiga saksi lagi yang bisa memberikan keterangan signifikan terkait peristiwa dugaan pemerkosaan yang menimpa AL.

"Namun tiga saksi yakni S, BG dan TV belum bisa hadir memberika keterangan. Tiga saksi ini ada yang mahasiswa dan ada yang bukan. Tim penyidik saat ini juga sudah berada di Maluku untuk melaksanakan persiapan pemeriksaan," terang AKBP Yuliyanto, Jumat (11/1).

Pihaknya berharap sejumlah pihak bisa kooperatif saat dimintai keterangan agar kasus ini cepat selesai. "Saya harap tidak ada kesimpangsiuran. Biarkan kami bekerja maksimal, sehingga bisa menemukan titik terang. Dari pihak korban, sampai saat ini juga tidak mau divisum. Hal ini sebenarnya cukup menyulitkan kasus ini cepat selesai," papar AKBP Yuliyanto.

Direktur Reserse Kriminal Umum Kombes Pol Hadi Utomo menerangkan, pemeriksaan tambahan atas terlapor DK untuk memperjelas hasil tim penyidik yang sudah berada di Maluku. Kombes Pol Hadi menegaskan, pihaknya terus berkomitmen menyelesaikan kasus ini seterang-terangnya.

"Hambatan memang ada, karena peristiwanya juga sudah lama. Muncul hambatan baru, korban dimintai visum dan suratnya justru dikembalikan dengan alasan tidak relevan," ujar Kombes Hadi Utomo. **(R-2) -a**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 6: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 23 Januari 2019

KASUS DUGAAN PERKOSAAN MAHASISWI UGM

Polda Temukan Ketidaksesuaian Fakta di Lapangan

SLEMAN (KR) - Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY, Kombes Pol Dr Hadi Utomo SH MH turun tangan langsung memimpin cek lokasi kejadian kasus dugaan perkosaan mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) di Pulau Seram.

Dari hasil cek lokasi kejadian, ada ketidaksesuaian isu yang beredar dengan fakta di lapangan.

Seperti lokasi kejadian yang digambarkan jauh dari permukiman dan banyak binatang liar. Faktanya lokasi kejadian dekat dengan permukiman. Kombes Pol Dr Hadi Utomo didampingi Kabid Humas AKBP Yuliyanto menegaskan, penyidikan masih berjalan. Selama berada di Pulau Seram, dia langsung mengecek rumah dan kamar tempat terjadinya dugaan perkosaan pada 2017 silam. Diisukan pondokannya jauh dari perkampungan dan banyak babi hutan. Fakta yang ditemukan, lokasi kejadian hanya berjarak 50 meter antara pondokan putra dan putri. "Tolong jangan ada pihak-pihak yang menyebarkan berita bohong," terang Kombes Pol Hadi Utomo, Senin (21/1) sore.

Hadi mengaku, penyidik sabar untuk mengungkap kasus dugaan perkosaan ini sejelas-jelasnya. Hadi membantah jika ada upaya kriminalisasi kepada pihak Balairung UGM. Pemanggilan terhadap beberapa rekan di Balairung, hanya untuk melakukan kroscek.

Penyidik hanya ingin bertanya sumbernya dari mana dan mengkroscek benar tidaknya apa yang mereka tulis. "Saya sudah menghubungi sejumlah pakar hukum. Kami berusaha membuat perkara ini jelas. Sesuatu yang awalnya simpang siur akan kami buat jelas," jelas Kombes Pol Hadi Utomo.

Sejauh ini, penyidik masih kesulitan menghubungi korban, AL. Bahkan korban juga telah mengirimkan surat penolakan terhadap permintaan visum yang dilayangkan penyidik. Pihak korban beralasan jika permintaan visum itu tidak relevan.

"Dikatakan menghambat iya, dikatakan tidak menghambat ya iya. Proses hukum tetap lanjut tapi jika AL sebagai korban tidak mau divisum, ya bagaimana status dia sebagai korban," tandas Kombes Pol Hadi. (R-2)-g

KR-Mahar Prastiwi

Kombes Pol Hadi Utomo didampingi AKBP Yuliyanto saat memberikan keterangan pers.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 7: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 6 Februari 2019

KASUS PERKOSAAN MAHASISWI UGM

Pelaku dan Penyintas Sepakat Damai

YOGYA (KR) - Kasus dugaan pelecehan seksual yang melibatkan mahasiswa UGM atau yang dikenal dengan Kasus Agni, dituntaskan dengan tercapainya kesepakatan damai dari semua pihak yang terlibat.

Sesuai keinginan penyintas (korban) AN, kasus ini diselesaikan dengan jalur nonlitigasi.

"Para pihak dengan kesungguhan hati telah saling bersepakat memilih penyelesaian nonlitigasi atau penyelesaian secara internal," terang Rektor UGM Prof Ir Panut Mulyono MEng DEng dalam jumpa pers di Gedung Pusat UGM, Senin (4/2). Hadir Wakil Rektor UGM Dr Paripurna dan Prof Djagal Wiseso Marsono, Dekan Fisipol UGM Dr Erwan Agus Purwanto serta Dekan FT UGM Prof Nizam.

Menurut Panut, mahasiswa berinisial HS (pelaku), telah menyatakan menyesal dan memohon maaf atas peristiwa yang terjadi saat KKN, Juni 2017. Selanjutnya HS diwajibkan mengikuti mandatory counseling dengan psikolog klinis yang ditunjuk oleh pihak ketiga atau yang dipilihnya sampai dinyatakan selesai oleh psikolog yang menanganinya. Sementara AN, juga akan mengikuti trauma counseling dengan psikolog klinis. "UGM memfasilitasi dan menanggung sepenuhnya kebutuhan dana konseling kedua pihak," imbuh Panut.

Di samping itu, kata Panut, UGM juga memberikan dukungan bagi AN untuk menyelesaikan studinya berupa dukungan dana yang dibutuhkan untuk penyelesaian studi setara dengan komponen beasiswa bidik misi, yaitu bantuan pembiayaan UKT dan bantuan biaya hidup. Kemudian Fisipol dan FT diberikan mandat untuk mengawal sepenuhnya proses pendidikan kedua mahasiswa untuk dapat diselesaikan pada Mei mendatang dan memastikan bahwa seluruh klausul dalam kesepakatan penyelesaian perkara ini dilaksanakan oleh semua pihak.

"Baik AN maupun HS dan UGM menyatakan bahwa perkara ini telah selesai, tinggal menyelesaikan proses-proses yang harus dijalani tersebut. Ke depan UGM akan melakukan pembenahan tata kelola penanganan perkara serupa serta upaya-upaya preventif agar hal seperti ini tidak terjadi lagi," ucap rektor.

Paripurna mengatakan, keputusan ini diambil setelah para pihak mendengarkan hasil dari proses-proses yang dilakukan oleh komite etik. "Karena ini menyangkut hal yang sensitif, dalam prosesnya kami memang harus berhati-hati supaya tidak menimbulkan dampak psikologis atau dampak lain kepada adik-adik mahasiswa ini," terang Paripurna.

Erwan mengungkapkan, pihaknya telah mengawal proses pembicaraan di antara para pihak tersebut dan mendengarkan keinginan dari mahasiswinya untuk memastikan munculnya penyelesaian yang adil bagi masing-masing pihak. "Munculnya kesepakatan ini lewat proses yang secara sadar diambil oleh saudari AN, bukan kami yang mendikte. Tugas kami adalah mendengarkan dan mengawal agar saudari AN mendapatkan keadilan, kami tidak ingin memaksakan pendapat kita," jelasnya. **(Dev)-g**

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 8: Pemberitaan Kedaulatan Rakyat 7 Februari 2019

MUNCUL INDIKASI TIDAK ADA PERKOSAAN

Penyidikan Kasus Mahasiswa UGM Dilanjutkan

SLEMAN (KR)- Penyidik Polda DIY tetap akan melakukan penyidikan untuk membuktikan ada atau tidaknya perbuatan dugaan perkosaan yang dialami mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM).

Hal ini disampaikan usai informasi adanya kesepakatan damai antara korban dan terlapor. Bahkan dari alat bukti yang dikumpulkan penyidik, muncul indikasi tidak ada perbuatan perkosaan.

Direktur Reserse Kriminal Umum Polda DIY Kombes Pol Hadi Utomo didampingi Kabid Humas AKBP Yuliyanto mengatakan, ia baru saja mendengar jika AL atau korban dan HS atau terlapor, melakukan kesepakatan damai. Namun penyidik tetap bekerja profesional dengan tetap melanjutkan rangkaian penyidikan terhadap perkara tindak pidana dugaan perkosaan dan perbuatan cabul tersebut. Bahkan hingga saat ini belum ada arah menuju surat perintah penghentian penyidikan (SP3).

"Jika berdamai mangga, bagus sekali. Tapi saya tetap akan buktikan pemerkosaan itu terjadi atau tidak. Itu tugas saya. Kesepakatan damai itu hanya menyumbang kepada saya bahwa kedua belah pihak tidak mempermasalahkan lagi peristiwa tersebut," ujar Kombes Pol Hadi Utomo kepada wartawan di Mapolda DIY, Rabu (6/2).

Kombes Pol Hadi menjelaskan, selama ini disampaikan ke publik jika telah terjadi dugaan perkosaan. Namun dari semua alat bukti yang telah dikumpulkan penyidik, pihaknya menemukan indikasi kuat jika perbuatan perkosaan dan pencabulan itu tidak terjadi. Namun hal ini belum menjadi kesimpulan akhir penyidik. Hadi berjanji jika temuan penyidik akan disampaikan ke publik. "Setelah ada kesepakatan damai, kami akan panggil lagi pihak pelapor dalam hal ini Pak Yoyok dari UGM, korban dan terlapor. Penyidikan kami belum finish," tandas Hadi.

Kombes Pol Hadi menambahkan, pihaknya akan melakukan satu gelar perkara lagi dan mengundang semua pihak. Selama proses penyidikan, ia juga sudah meminta pendapat ahli dari UII Dr Mujakir untuk memberikan pendapat apakah ada peristiwa tersebut tindakan pidana atau bukan. "Penyidikan sesuai SOP yang ada. Setelah ada keterangan saksi dan alat bukti, langkah berikutnya melakukan gelar perkara dan mengundang para pihak," tutup Hadi. **(R-2)-g**

KR-Mahar Prastiwi

Kombes Pol Hadi Utomo didampingi AKBP Yuliyanto saat memberikan keterangan pers di Mapolda DIY.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA